

2026



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

TAHUN 2025



Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP Kabupaten Malinau Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau **“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional”**.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 serta sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Malinau, 30 Maret 2026

Bupati Malinau



WEMPI W. MAWA, SE., M.H



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau ditahun 2025 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau terdiri atas:



Capaian kinerja indikator kinerja utama tahun 2025 memberikan gambaran keberhasilan kinerja dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Malinau. Ukuran tingkat tercapainya dan tidak tercapainya indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	71,24	69,86	98,06%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	82,01	82,05	100,01%
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam	Indeks Ketimpangan Gender	0,472	0,48	101,7%



	pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	100	100	100%
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,79	-	-
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	68,22	53,90	79,01%
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,64	5,56	116,26%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,07	3,42	88,59%
		Indeks Gini	0,275	0,249	109,4%
6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9,77	9,37	95,90%
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,11	2,07	98,10%
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,06	2,21	107,28%
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,98		
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	5,94		
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	54,87	-5,4	-9,84%
9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	26,67	74,69	280%
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	4,30	5,21	121,16%
		Laju inflasi daerah	2,5	2,230	89,2%



11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	0,50	0,347	69,4%
12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar yang baik	43,09	74,69	173%
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,86	87,51	109,58%
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,39	79,59%
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,32	83,66	99,21%
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,1	71.17	98,71%
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Pernyataan Reviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi

B A B I P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU	2
C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU	6
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	9
E. MAKSUD DAN TUJUAN	15
F. SUMBER DAYA MANUSIA	16
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17

B A B II P E R E N C A N A A N K I N E R J A

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029	20
1. VISI	20
2. MISI	21
3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	22
4. INDIKATOR KINERJA	23
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
6. PROGRAM	27
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	32
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	35

B A B III A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	39
C. REALISASI ANGGARAN	171
D. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI	175
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025	180

B A B IV P E N U T U P	181
-------------------------------------	-----

L A M P I R A N



Daftar Tabel

Tabel	1.1	Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau	3
Tabel	1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	5
Tabel	1.3	Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan	16
Tabel	2.1	Indikator Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	23
Tabel	2.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	26
Tabel	2.3	Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	27
Tabel	3.2	Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	37
Tabel	3.20	Realisasi Anggaran Tiap Program Tahun 2025	171
Tabel	3.21	Tingkat Efektivitas Anggaran Tahun Anggaran 2025	176
Tabel	3.22	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2025	178



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah selama satu tahun anggaran. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau menuju *good government* dan *clean government* itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan Tahun 2025 Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2024 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi



tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep *good governance*, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2024.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau merupakan satu kabupaten dari empat kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Kondisi Geografi dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara. Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kabupaten Malinau, yang merupakan daratan dengan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief sehingga menjadikan Malinau sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara.



Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah administratif Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 2 Kecamatan Perwakilan yakni Kecamatan Perwakilan Long Sule dan Kecamatan Perwakilan Malinau Utara Timur dengan 109 desa. Kabupaten Malinau juga secara langsung berbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia serta beberapa Kabupaten/Kota, tepatnya Negara Bagian Serawak di sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung, Berau, Kutai Timur dan Bulungan di sebelah timur, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan.

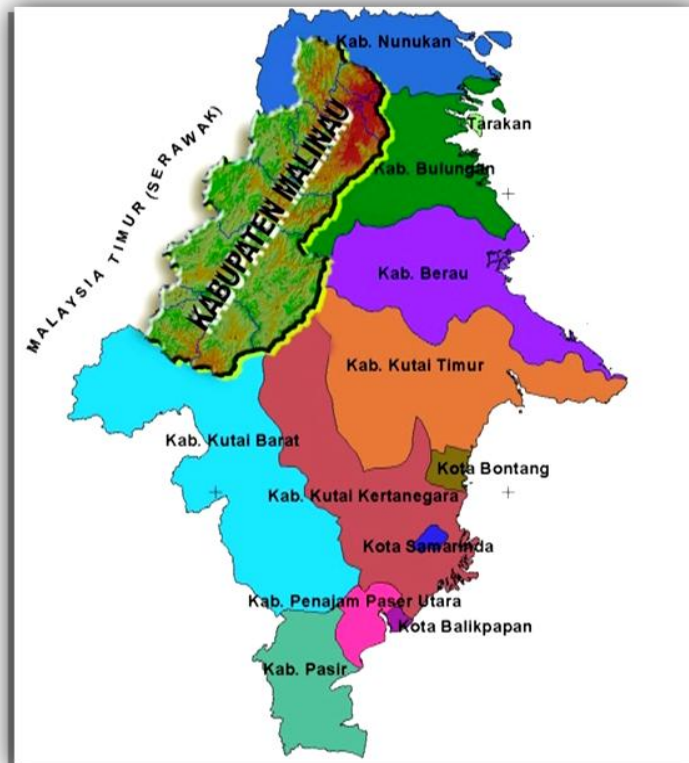
Dari lima belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang menyumbang 29,22 persen dari keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Malinau yaitu mencapai 11.370,43 km². Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malinau Kota, yaitu sebesar 114,21 Km² atau 0,29 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malinau. Sementara itu Kecamatan Sungai Boh merupakan Kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari ibukota Kabupaten.

Tabel 1.1
Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RT	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kab (%)
Malinau Kota	Malinau Kota	6	54	113,06	0,29
Malinau Utara	Malinau Sebrang	12	47	1.076,69	2,76
Malinau Barat	Tanjung Lapang	9	43	740,57	1,90
Malinau Selatan	Long Loreh	9	32	1.025,49	2,63
Mentarang	Pulau Sapi	6	34	578,15	1,75
Mentarang Hulu	Long Berang	10	13	2.496,74	6,15
Pujungan	Long Pujungan	9	21	6.911,28	17,76
Bahau Hulu	Long Alango	6	13	3.065,85	7,88
Sungai Boh	Mahak Baru	6	15	2.803,04	7,20
Kayan Hulu	Long Nawang	5	20	1.971,22	5,07
Kayan Hilir	Data Dian	5	15	11.371,94	29,22
Kayan Selatan	Long Ampung	5	13	1.373,53	3,53
Malinau Selatan Hulu	Metut	8	27	2.345,00	6,02
Malinau Selatan Hilir	Setarap	8	21	603,43	1,55
Sungai Tubu	Long Pada	5	13	2.444,98	6,28
Jumlah		109	381	38.921,01	100

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara dengan total luas wilayah $\pm 38.921,01 \text{ km}^2$. Apabila GAMBARAN UMUM DAERAH II-2 dibandingkan dengan luas Provinsi, luas Kabupaten Malinau sebesar 51,64 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara (70.101,00 km^2).



Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

b. Topografi

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu Gunung Laga Feratu (5.910 m) di Kecamatan Mentarang. Kawasan perbukitan juga terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan ketinggian 500-1.500 meter di atas permukaan laut. Sementara itu dataran rendah terdapat pada sekitar daerah aliran sungai di bagian timur dari wilayah utara yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak, dan Sungai Salap.

Kabupaten Malinau memiliki karakteristik topografi yang bervariasi, dengan wilayah perbukitan yang mendominasi bagian barat dan selatan, serta dataran rendah



yang tersebar di sepanjang daerah aliran sungai di bagian timur. Berdasarkan data, kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah Pujungan (1.031,14 mdpl), Kayan Hilir (914,73 mdpl), dan Kayan Hulu (897,32 mdpl), yang berada di kawasan pegunungan. Sebaliknya, kecamatan dengan ketinggian terendah adalah Malinau Kota (56,96 mdpl), Malinau Barat (125,00 mdpl), dan Malinau Utara (224,70 mdpl), yang terletak di sekitar aliran Sungai Malinau dan wilayah sekitarnya. Dengan rata-rata ketinggian 587,34 mdpl, Kabupaten Malinau memiliki lanskap yang beragam, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan serta pengembangan infrastruktur. Sedangkan Kecamatan Sungai Boh merupakan kecamatan yang terjauh dari ibu Kota Kabupaten dengan jarak 277,87 km dan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Malinau pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk penduduk 88.931 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 46.832 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 42.099 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 27.741 jiwa, disusul Kecamatan Malinau Utara sebesar 16.370 jiwa dan Malinau Barat sebesar 12.148 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu sebesar 1.005 jiwa dan Kecamatan Bahau Hulu sebesar 1.457 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Mentarang	3.075	2.813	5.888
2	Malinau Kota	14.375	13.366	27.741
3	Pujungan	1.075	941	2.013
4	Kayan Hilir	897	690	1.587
5	Kayan Hulu	1.301	1.193	2.494
6	Malinau Selatan	3.019	2.607	5.626
7	Malinau Utara	8.718	7,652	16.370
8	Malinau Barat	6.377	5.771	12.184
9	Sungai Boh	1.379	1.178	2.557



10	Kayan Selatan	1.045	969	2.014
11	Bahau Hulu	796	661	1.457
12	Mentarang Hulu	1.001	925	1.926
13	Malinau Selatan Hilir	1.678	1.491	3.169
14	Malinau Selatan Hulu	1.534	1.352	2.886
15	Sungai Tubu	565	490	1.055
Jumlah		46.832	42.099	88.931

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2025

C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
13. Pelayanan administrasi penanaman modal;



14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
15. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan urusan lain-lain yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
- b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
- c. Inspektorat Daerah (Tipe A);
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
- g. Kecamatan

Sekretariat Daerah terdiri atas:

1. Bagian Hukum
2. Bagian Tata Pemerintahan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam
5. Bagian Administrasi Pembangunan
6. Bagian Barang dan Jasa
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10. Bagian Perencanaan dan keuangan

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan (Tipe B);
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);



5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
10. Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C)
11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
13. Dinas Perhubungan (Tipe C);
14. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
15. Dinas Pertanian (Tipe C);
16. Dinas Perikanan (Tipe C);
17. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A).
20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe C).

Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Tipe A);
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B);

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A)

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Malinau Kota (Tipe A);
2. Kecamatan Malinau Utara (Tipe A);
3. Kecamatan Malinau Barat (Tipe A);
4. Kecamatan Malinau Selatan (Tipe A);
5. Kecamatan Mentarang (Tipe A);
6. Kecamatan Mentarang Hulu (Tipe A);
7. Kecamatan Pujungan (Tipe A);
8. Kecamatan Bahau Hulu (Tipe A);
9. Kecamatan Sungai Boh (Tipe A);
10. Kecamatan Kayan Hulu (Tipe A);



11. Kecamatan Kayan Hilir (Tipe A);
12. Kecamatan Kayan Selatan (Tipe A);
13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Tipe A);
14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Tipe A); dan
15. Kecamatan Sungai Tubu (Tipe A);

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun, sebaliknya, jika isu-isu strategis diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang menjadi langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Isu strategis juga memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah. Dengan beberapa penjabaran isu global, nasional dan regional wilayah Kalimantan Utara, maka terdapat enam isu strategis RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2045 yakni sebagai berikut:

1) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan.

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Malinau pada periode 2025-2029 menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah. Melalui penerapan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Malinau berusaha untuk mengubah pola ekonomi yang didasarkan pada sumber daya alam menjadi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup



diversifikasi sektor ekonomi, pengembangan industri berbasis teknologi hijau, serta promosi pariwisata berkelanjutan yang memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal. Selain itu, transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Malinau juga menekankan pada inklusivitas dan pemerataan pembangunan. Langkah langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah pedalaman dan terpencil. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, Kabupaten Malinau berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua warganya.

2) Pemenuhan infrastruktur pembangunan yang merata, konsisten dan berkualitas.

Pemenuhan infrastruktur yang merata, konsisten, dan berkualitas menjadi isu krusial dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau. Hal ini mengacu pada kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya tersebar secara merata di seluruh wilayah, tetapi juga tetap terjaga konsistensinya dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitasnya. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, menjadi pondasi utama bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemenuhan infrastruktur yang merata, setiap warga di Kabupaten Malinau akan memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar, meningkatkan mobilitas, konektivitas, dan kesempatan ekonomi di seluruh wilayah. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang konsisten dan berkualitas juga menjadi kunci untuk menarik investasi, mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkuat ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Dengan demikian, Kabupaten Malinau dapat terus maju dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memperkuat posisinya dalam arus pembangunan regional dan nasional.

3) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh di segala aspek pemerintahan.

Implementasi transformasi birokrasi berbasis pemanfaatan IT menjadi isu strategis dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini meliputi penerapan sistem administrasi elektronik, pembangunan portal dan aplikasi yang memudahkan akses informasi bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk

mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, transformasi birokrasi berbasis IT dapat membantu meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat proses pengurusan perizinan, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Selain itu, implementasi transformasi birokrasi berbasis IT juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Dengan memanfaatkan platform digital, seperti media sosial atau aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, menerima masukan dan aspirasi, serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, transformasi birokrasi berbasis IT bukan hanya sekadar alat untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi publik dan membangun pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

4) Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Malinau.

Isu strategis akselerasi pengentasan kemiskinan kultural menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dalam mengatasi kemiskinan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek budaya, sosial, dan psikologis. Kemiskinan kultural mencakup berbagai faktor seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi etnis, kurangnya akses pendidikan dan informasi, serta pola pikir dan norma yang membatasi kemampuan individu untuk mencapai potensinya. Untuk mengatasi kemiskinan kultural, diperlukan pendekatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, promosi kesetaraan gender, pelestarian budaya lokal, dan penghapusan diskriminasi. Selain itu, pentingnya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata juga menjadi kunci dalam akselerasi pengentasan kemiskinan kultural. Hal ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan aspek-aspek budaya dan sosial dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya dan mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

5) Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan.

Isu akselerasi pengentasan kemiskinan kultural menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau. Kabupaten ini memiliki kekayaan budaya yang beragam namun juga dihadapkan pada tantangan kemiskinan yang bersifat tidak hanya ekonomi, tetapi juga kultural. Upaya pengentasan kemiskinan kultural



membutuhkan pendekatan yang holistik, yang mencakup pemberdayaan masyarakat, penghapusan diskriminasi, pemenuhan hak-hak dasar, serta promosi kesetaraan gender. Dalam konteks Malinau, akselerasi pengentasan kemiskinan kultural memerlukan upaya konkret dalam memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Ini meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pelestarian dan promosi budaya lokal juga penting untuk meningkatkan harga diri dan identitas masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi baru melalui pariwisata dan industri kreatif. Dengan demikian, akselerasi pengentasan kemiskinan kultural menjadi bagian integral dari upaya membangun Kabupaten Malinau yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

6) Penguatan ketahanan dan keamanan terhadap tindak kejahatan, khususnya Human Trafficking dan Narkoba

Kabupaten Malinau, sebagai salah satu daerah perbatasan di Kalimantan Utara, menghadapi tantangan serius berupa jalur ilegal (“rat paths”) yang digunakan oleh sindikat untuk melakukan human trafficking—terutama pemindahan tenaga kerja ke sektor perkebunan atau domestik melalui jalur tak resmi. Banyak korban yang tidak memiliki dokumen resmi, terkecoh janji kerja, lalu terjebak di jalur ini. Selain itu, Kabupaten Malinau juga rentan terhadap penyelundupan narkoba, seiring dengan meningkatnya peredaran methamphetamine (shabu) dan ecstasy (narkotika) yang sering dipantau di perbatasan antarprovinsi maupun antarnegara. Kondisi geografisnya yang luas dan minim infrastruktur keamanan menjadikan Malinau rawan terhadap kedua kejahatan transnasional ini.

Dalam menghadapi ancaman ini, Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil pendekatan strategis yang menekankan penguatan sinergi antar-instansi, peningkatan pengawasan perbatasan, dan pendekatan berbasis masyarakat. Misalnya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Long Nawang dan sekitarnya menyediakan titik resmi lintasan yang memungkinkan kontrol lalu lintas manusia dan barang lebih terarah. Selain itu, kolaborasi lintas batas dengan otoritas negara tetangga (Malaysia) melalui forum seperti General Border Committee (GBC), dengan ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dan penindakan kasus narkoba dan migrasi ilegal maupun trafficking. Kemudian perlu adanya upaya dalam memberikan pendampingan terhadap korban trafficking, mengedukasi masyarakat desa melalui kampanye tentang risiko jalur ilegal, dan membangun kepercayaan agar masyarakat berani melapor. Hal ini



mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menciptakan lingkungan yang aman namun tetap peduli. Dengan pendekatan yang inklusif dan preventif, diharapkan bukan hanya terhentinya praktik kriminal, tetapi juga terbangunnya kesadaran kolektif sebuah fondasi kuat untuk mewujudkan ketangguhan keamanan dan kesejahteraan di Kabupaten Malinau.

7) Potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon

Kabupaten Malinau menyadari bahwa sekitar sebagian besar wilayahnya merupakan tanah adat yang telah dipetakan, sehingga pengelolaan pertanahan masyarakat hukum adat menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah. Tantangan muncul ketika pengakuan formal atas hak tanah ulayat belum merata di seluruh komunitas, seperti yang dialami masyarakat Dayak Tenggala di Desa Belayan yang baru mendapatkan pengakuan melalui SK Bupati seluas 24.873,96 hektar pada tahun 2024, setelah melalui proses panjang meliputi kajian sejarah, penetapan batas wilayah adat, hingga verifikasi lapangan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 menjadi landasan hukum penting bagi penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, yang diperkuat oleh pedoman teknis Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) terkait mekanisme identifikasi, pendaftaran, verifikasi, dan validasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat adat sendiri. Pendekatan ini menekankan asas transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan sebagai upaya menyeimbangkan pengakuan hukum dengan pemajuan budaya lokal. Pengakuan atas tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai legalitas semata, tetapi juga sebagai penguatan martabat dan kedaulatan masyarakat adat, sekaligus energi pemberdayaan untuk menjaga lingkungan dan warisan budaya demi masa depan generasi penerus. Dengan tata kelola pertanahan yang berlandaskan kebijaksanaan lokal, inklusif, dan transparan, Kabupaten Malinau menempatkan masyarakat adat sebagai mitra sejati dalam pembangunan, bukan sekadar objek, sehingga tercipta masa depan yang lebih adil, lestari, dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat.

8) Potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon

Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu daerah dengan tutupan hutan tropis yang masih terjaga secara luas dan alami. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Malinau sebagai daerah dengan potensi signifikan dalam



penyimpanan dan penyerapan karbon (carbon stock dan carbon sequestration), yang sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim. Potensi ini bukan hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon (carbon trading) dan program berbasis mekanisme REDD+ yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, pemanfaatan potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon memerlukan tata kelola yang tepat dan terintegrasi. Tantangan yang dihadapi meliputi potensi deforestasi, degradasi hutan akibat aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, serta perlunya kepastian hukum atas hak kelola, termasuk hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan berbasis sustainable forest management yang mengedepankan perlindungan ekosistem, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari karbon yang dihasilkan tidak mengorbankan fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data ilmiah, potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi hijau daerah. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dapat mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, lembaga internasional, dan komunitas lokal untuk memonetisasi nilai karbon melalui perdagangan karbon sukarela (voluntary carbon market) maupun pasar wajib (compliance market). Upaya ini tidak hanya akan memberikan pendapatan tambahan bagi daerah dan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Malinau sebagai pionir pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya.

9) Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah.

Isu jangka menengah di Kabupaten Malinau tentang peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah menyoroti perlunya upaya serius dalam melindungi lingkungan dan mempersiapkan diri menghadapi dampak bencana alam yang semakin kompleks. Kabupaten Malinau memiliki kekayaan alam yang besar, namun juga rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Peningkatan ketahanan lingkungan hidup mengharuskan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemulihan dan pelestarian ekosistem yang terancam. Selain itu, ketangguhan terhadap bencana daerah menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Malinau. Ini meliputi penyusunan rencana tanggap darurat



yang efektif, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini yang cepat dan akurat. Dengan memperkuat ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana daerah, Kabupaten Malinau dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi penduduknya serta menjaga keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Pelaporan Kinerja.

Esensi dari sistem Pelaporan Kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintahan Kabupaten Malinau untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan melalui implelementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana baik. Impelementasi sistem Pelaporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Pelaporan Kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Presiden, Kementerian PAN&RB, Kemendagri, Bappenas, Provinsi Kalimantan Utara, BPKP dan masyarakat).

2. Pelaporan Kinerja adalah sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama Pelaporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Malinau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan Pelaporan Kinerja 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Malinau dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 sebanyak 3.037 orang terdiri dari Pria 1.532 orang dan Wanita 1.505 orang dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	I/a Juru Muda	0	0	0
2	I/b Juru Muda Tingkat I	0	1	1
3	I/c Juru	2	0	2
4	I/d Juru Tingkat I	8	1	9
Jumlah Golongan I		10	2	12
5	II/a Pengatur Muda	15	8	23
6	II/b Pengatur Muda Tk.I	32	12	44



7	II/c Pengatur	39	22	61
8	II/d Pengatur Tingkat I	97	60	157
Jumlah Golongan II		183	102	285
9	III/a Penata Muda	226	209	435
10	III/b Penata Muda Tk.I	307	391	698
11	III/c Penata	198	284	482
12	III/d Penata Tingkat I	334	299	633
Jumlah Golongan III		1065	1183	2.248
13	IV/a Pembina	152	132	284
14	IV/b Pembina Tingkat I	95	79	174
15	IV/c Pembina Utama Muda	26	7	33
16	IV/d Pembina Utama Madya	1	0	1
Jumlah Golongan IV		274	218	492
TOTAL		1.532	1.505	3.037

Sumber: BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2025

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan di masa datang.



Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan;

Menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Malinau dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2025.

Bab II Perencanaan Kinerja;

Menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2025-2029 dan rencana kinerja untuk Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja;

Disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup;

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.



A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029.

RPJMD Malinau sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat pemilihnya, yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Malinau juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumberdaya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.

RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Malinau, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan Pemerintahan yang Profesional”



Dalam rumusan visi ini terkandung 4 (empat) rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Malinau di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Malinau dijelaskan sebagai berikut.

1. **Berkeadilan, Sejahtera, Nilai Budaya dan Kearifan Lokal**, Terwujudnya pembangunan sosial yang berkualitas secara merata berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal
2. **Maju dan Mandiri**, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang memiliki daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta pembangunan infrastruktur yang adil dan handal.
3. **Berkelanjutan**, Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.
4. **Pemerintahan yang Profesional**, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan serta meningkatnya daya saing daerah.

2. MISI

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- MISI 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia**, Mengembangkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, serta memastikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malinau, dengan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- MISI 2 : Pengembangan Ekonomi Lokal**, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM melalui pemberian dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar.



- MISI 3 : Peningkatan Infrastruktur,** Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, perumahan permukiman dan sanitasi, untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- MIS 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan,** Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- MISI 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani,** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dengan pelayanan publik yang prima melalui transformasi digital Pemerintah Kabupaten Malinau.
- MISI 6 : Pemberdayaan Desa,** Memperkuat desa sebagai basis pembangunan daerah dengan memberikan dukungan yang maksimal bagi program-program desa dan RT yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malinau, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara lebih terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut:

3.1 Tujuan

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat.
2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang adil dan handal.



4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah
5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan

3.2 Sasaran

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat.
4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika.
5. Menurunnya Tingkat Kemiskinan.
6. Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan.
7. Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas.
8. Meningkatnya Realisasi nilai investasi.
9. Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi.
10. Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah.
11. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
12. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah.
13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
14. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana.
15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
17. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. INDIKATOR KINERJA

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks kesehatan



		Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender
			Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka
			Indeks Gini
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi (non Batubara)	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
			Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
			Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
		Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sector pertanian
		Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah
		Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap
		Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal
			Laju inflasi daerah
Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang adil dan handal	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas
		Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP



		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK
--	--	--	-----------

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malinau. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi pengembangan SDM, pemberdayaan desa, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, pengelolaan SDA, dan peningkatan kualitas tata kelola. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.



Tabel 2.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau
Tahun 2025-2029

MISI	ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan akses pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi, terutama bagi keluarga yang kurang mampu
	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai
	Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas
	Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi
	Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat
	Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dan memiliki toleransi dan nilai kearifan lokal
	Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif
Pengembangan Ekonomi Lokal	Pengembangan sektor pertanian yang produktif
	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas
	Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis sumber daya lokal
	Peningkatan kualitas kepariwisataan daerah
	Penguatan peran Generasi Muda khususnya kelompok millenial yang mandiri
Peningkatan Infrastruktur	Penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan
	Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pelaksana pembangunan dalam melestarikan lingkungan
	Peningkatan mitigasi struktural dan non struktural



	dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif
	Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah
Pemberdayaan Desa	Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan

6. PROGRAM

6.1. Program-program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Malinau. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Program atau proyek strategis yang dapat disusun adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Priorotas
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pembinaan Perpustakaan



	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks kesehatan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Perlindungan Khusus Anak
		Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pengembangan Kebudayaan
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
		Indeks Gini	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat



			Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sector pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Hubungan Industrial
Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang adil dan handal	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Perekonomian dan Pembangunan
	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Riset dan Inovasi Daerah
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum
			Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah



**6.2. Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Malinau 2025-2029**

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Malinau dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat. Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Proyek Strategis KDH yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Program-program inovatif Kepala Daerah Kabupaten Malinau tersebut terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Wajib Belajar Malinau Maju;
2. Program Desa Serjana Unggul;
3. Program Pesat (*Petani Sehat*);
4. Program Saget (*Smart Government*);
5. Program Milenial mandiri



B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	Poin	71,24
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,01
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,472
		Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	Persen	100
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	58,79
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Poin	68,22
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,64
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,07



		Indeks Gini	Poin	0,275
6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	9,77
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	2,11
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,06
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	0,98
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	Persen	5,94
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	Persen	54,87
9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	Persen	26,67
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Poin	4,30
		Laju inflasi daerah	persen	2,5
11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	0,50
12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar yang baik	Persen	43,09
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	79,86
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,49
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,32
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	72,1
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Opini	WTP



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	71,24
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	82,01
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	0,472
		Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	100
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,79
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	68,22
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,64
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,07



		Indeks Gini	0,275
6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9,77
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,11
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,06
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,98
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	5,94
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	54,87
9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	26,67
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	4,30
		Laju inflasi daerah	2,5
11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	0,50
12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar yang baik	43,09
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,86
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,32
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,1
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI
2.	76% ≤ 90%	TINGGI
3.	66% ≤ 75%	SEDANG
4.	51% ≤ 65%	RENDAH
5.	≤ 50%	SANGAT RENDAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai bagian dari upaya evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran strategi tahun berjalan, diperlukan gambaran mengenai capaian kinerja Kabupaten Malinau tahun 2025. Capaian ini disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penyajian capaian kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan dalam pencapaian target pembangunan daerah. Rincian capaian kinerja Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	71,24	69,86	98,06%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	82,01	82,05	100,01%
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	0,472	0,48	101,7%
		Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	100	100	100%



4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,79	-	-
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	68,22	53,90	79,01%
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,64	5,56	116,26%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,07	3,42	88,59%
		Indeks Gini	0,275	0,249	109,4%
6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9,77	9,37	95,90%
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,11	2,07	98,10%
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,06	2,21	107,28%
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,98		
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	5,94		
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	54,87	-5,4	-9,84%
9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	26,67	74,69	180%
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	4,30	5,21	121,16%
		Laju inflasi daerah	2,5	2,230	89,2%
11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	0,50	0,347	69,4%

12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar yang baik	43,09	74,69	173%
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,86	87,51	109,58%
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,39	79,59%
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,32	83,66	99,21%
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,1	71,17	98,71%
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian 25 indikator sasaran terhadap 17 sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja selama tahun 2025 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta analisis capaiannya.

Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata

Pengukuran sasaran Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata dengan indikator kinerja sasaran angka indeks pendidikan, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Indeks Pendidikan	Poin	102,97%	71,24	69,86	98,06%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Indeks Pendidikan	Poin	69,18	69,86	74.05

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	69,86		

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merepresentasikan capaian pembangunan pada dimensi pendidikan di suatu daerah. Indeks ini menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses, partisipasi, serta kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks Pendidikan digunakan sebagai salah satu indikator strategis untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan. Peningkatan nilai indeks pendidikan menunjukkan adanya perbaikan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah, serta peningkatan tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, indikator ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai program pembangunan pendidikan, seperti peningkatan akses layanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan tata kelola pendidikan.

Selain itu, capaian Indeks Pendidikan juga mencerminkan dampak jangka panjang dari berbagai intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan kualitas pembelajaran akan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan program pembangunan pendidikan

yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan nilai Indeks Pendidikan.

Indeks Pendidikan dihitung dari dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah menggambarkan perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator tersebut mencerminkan dimensi akses terhadap pendidikan sekaligus capaian pendidikan masyarakat yang telah berlangsung dalam jangka panjang.

$$\begin{aligned} I_{HLS} &= \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \\ I_{RLS} &= \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \\ I_{pendidikan} &= \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \times 100 \end{aligned}$$

Keterangan :

I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS min = Harapan Lama Sekolah Minimal (0)

HLS maks = Harapan Lama Sekolah Maksimal (18)

I RLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

RLS min = Rata-rata Sekolah Minimal (0)

RLS maks = Rata-rata Sekolah Maksimal (15)

I pendidikan = Indeks Pendidikan

Terdapat beberapa faktor keberhasilan yang dapat menyebabkan Peningkatan Capaian indeks pendidikan, yaitu :

1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS).

Peningkatan RLS dan HLS menunjukkan bahwa anak usia sekolah memiliki peluang yang lebih besar untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa meningkatnya partisipasi



sekolah serta adanya berbagai program bantuan pendidikan yang mendukung keberlanjutan pendidikan.

2. Peningkatan akses pendidikan.

Peningkatan akses pendidikan ini memungkinkan lebih banyak anak untuk mengakses pendidikan formal, seperti meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan di berbagai wilayah melalui pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan diseluruh wilayah.

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan indeks pendidikan

4. Distribusi guru yang merata

Distribusi guru yang merata dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, terutama di wilayah yang sebelumnya kekurangan tenaga pendidik. Dengan tersedianya guru yang cukup di setiap satuan pendidikan, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan. Kondisi ini mendorong meningkatnya partisipasi sekolah, mengurangi risiko putus sekolah, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain faktor keberhasilan dalam ketercapaian indeks pendidikan, terdapat faktor kegagalan yang dapat menyebabkan capaian indeks pendidikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Capaian Rata-rata lama sekolah (RLS) relatif meningkat secara lambat

Karena RLS dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas, perubahan indikator ini memerlukan waktu yang relatif panjang.

2. Kesenjangan Akses Pendidikan Antar Wilayah

Karakteristik geografis Kabupaten Malinau yang cukup luas dan sebagian wilayahnya terpencil menyebabkan masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antar wilayah

3. Keberlanjutan Pendidikan pada Jenjang Menengah

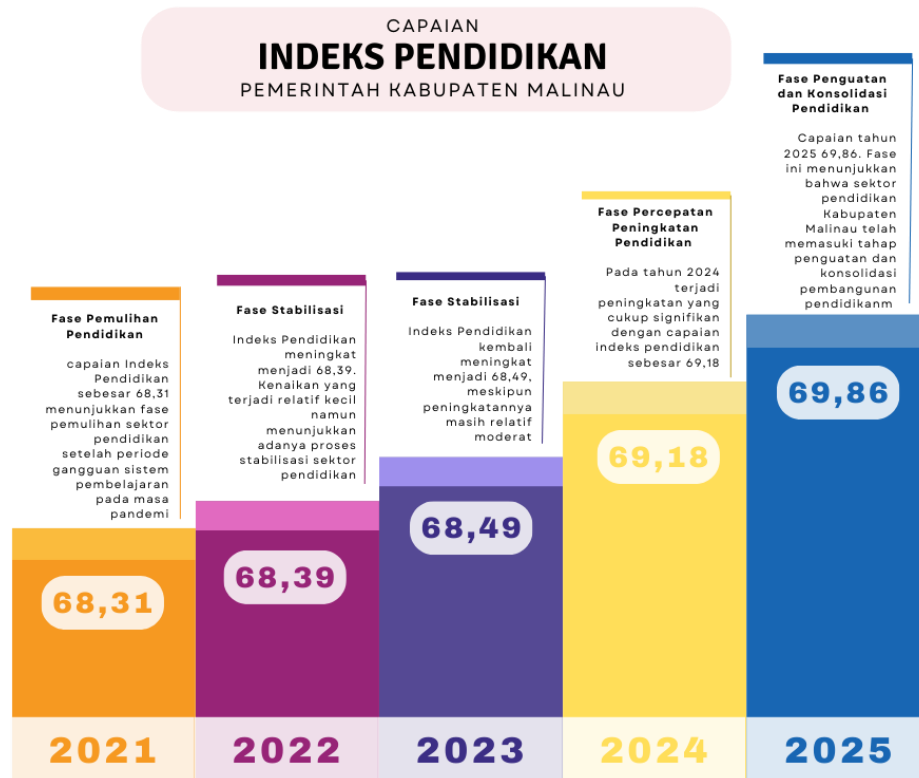
Sebagian peserta didik belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atau lebih tinggi. Kondisi tersebut berdampak terhadap peningkatan RLS dan pada akhirnya mempengaruhi indeks pendidikan

4. Pemerataan guru yang belum optimal

Salah satu faktor kegagalan yang utama adalah masih adanya konsentrasi guru di wilayah perkotaan atau sekolah yang relatif maju, sementara beberapa wilayah

terpencil atau daerah dengan kondisi geografis sulit masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal karena jumlah guru yang terbatas harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Dampaknya, kualitas pembelajaran menjadi kurang maksimal dan minat belajar peserta didik dapat menurun.

2. Analisis peningkatan/penurunan kinerja



a. Peningkatan kinerja

Berdasarkan data capaian selama lima tahun terakhir, indikator Indeks Pendidikan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021 capaian indeks pendidikan sebesar 68,31, kemudian meningkat menjadi 68,39 pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 68,49 pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 69,18, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 69,86. Secara keseluruhan, selama periode 2021–2025 terjadi peningkatan sebesar 1,55 poin.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Tren positif ini mengindikasikan bahwa berbagai



kebijakan dan program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah daerah mulai memberikan dampak terhadap peningkatan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan adanya perbaikan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai komponen utama dalam pembentukan indeks pendidikan.

b. Penurunan kinerja

Berdasarkan data capaian pada periode 2021–2025, tidak terdapat penurunan nilai indeks pendidikan, melainkan peningkatan yang terjadi secara bertahap setiap tahunnya. Namun demikian, apabila dilihat dari laju peningkatannya, pada periode 2021–2023 kenaikan indeks pendidikan masih relatif rendah, dengan peningkatan kurang dari 0,10 poin per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pada dimensi pendidikan masih berjalan secara gradual dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memberikan dampak yang lebih signifikan.

Selain itu, meskipun terjadi peningkatan setiap tahun, capaian indeks pendidikan pada tahun 2025 yang sebesar 69,86 masih berada di bawah target akhir RPJMD sebesar 74,05 selisih 4,19 poin untuk dapat mencapai target akhir periode renstra . Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi belum sepenuhnya mampu mengejar target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah, tingkat partisipasi pendidikan yang belum optimal khususnya dijenjang nonformal , serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan.

3. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mempercepat peningkatan indeks pendidikan guna mencapai target akhir RPJMD sebesar 74,05, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan, ialah :

a. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan

Pemerintah Kabupaten Malinau, melalui Dinas Pendidikan telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan dengan melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan telah secara bertahap melakukan pemerataan guru di seluruh wilayah kabupaten malinau sehingga dapat meminimalisir kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah serta melakukan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk memaksimalkan



kualitas hasil belajar sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi dan mempertahankan keberlanjutan pendidikan.

b. Peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah

Pemerintah kabupaten malinau melalui dinas pendidikan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah, dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) diseluruh jenjang dibawah kewenangan pemerintah kabupaten yang bersumber dari APBD, dengan adanya bantuan operasional sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik untuk menunjang operasional sekolah, sehingga siswa-siswi tidak terbebani terkait biaya untuk sekolah khususnya bagi siswa-siswi tidak mampu. Kemudian terdapat program inovasi kepala daerah yaitu Program Wajib Belajar Maju dimana salah satu kegiatan pada program tersebut berupa bantuan perlengkapan siswa (seragam, atribut, tas dan sepatu) di jenjang PAUD, SD dan SMP. Dengan pemberian bantuan tersebut pemerintah kabupaten malinau telah membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Dengan berkurangnya biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga, peluang anak untuk tetap bersekolah menjadi lebih besar. Bantuan perlengkapan siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah serta dapat mengurangi kesenjangan antara siswa dari keluarga mampu dan siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mendukung prinsip pemerataan akses pendidikan

c. Mengembangkan pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan.

Pemerintah kabupaten malinau melalui Dinas Pendidikan telah memiliki lembaga-lembaga nonformal untuk dapat mengakomodir siswa-siswi yang putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikan formal. Pendidikan nonformal memungkinkan masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat tanpa batasan usia, sehingga meningkatkan kemampuan dasar yang mendukung kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan sosial dan ekonomi. Terdapat 9 lembaga nonformal yang ada di malinau, diantaranya tersebar di 6 kecamatan, sebagai berikut:

No	Nama PKBM	Status Sekolah	Kecamatan
1	PKBM Alfa Omega	Swasta	Malinau Kota
2	PKBM BAWA TAWAI	Swasta	Bahau Hulu
3	PKBM BENTARA KASIH	Swasta	Malinau Kota
4	PKBM FEBAYA	Swasta	Mentarang
5	PKBM IMBAYA	Swasta	Malinau Utara
6	PKBM MELATI	Swasta	Mentarang
7	PKBM SENGAYAN	Swasta	Malinau Selatan
8	PKBM TIGA TAWAI	Swasta	Kayan Hulu
9	PKBM TRANS	Swasta	Malinau Kota

Dengan adanya pendidikan nonformal , dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan harapan lama sekolah dengan memungkinkan masyarakat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta meningkatkan peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Kedepannya akan dilakukan pengembangan program pendidikan nonformal atau kesetaraan dikecamatan-kecamatan yang belum terlayani pendidikan nonformal atau PKBM untuk dapat mengakomodir siswa-siswi putus sekolah atau yang belum menyelesaikan pendidikan formal, sehingga dapat meminimalisir anak tidak sekolah diseluruh wilayah sehingga dapat meningkatkan capaian indeks pendidikan melalui peningkatan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- *E* : Efisiensi
- *PAKi* : Pagu anggaran keluaran *i*
- *RAKi* : Realisasi anggaran keluaran *i*
- *CKi* : Capaian kinerja *i*

Tabel 3.3.4
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8} \times 100\%$	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,24	69,86	98,06%	303.915.710.883,41	276.593.641.866,00	7,19%	efisien

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dari tabel diatas pagu anggaran untuk indikator kinerja indeks pendidikan sebesar Rp 303.915.710.883,41 dengan realisasi Rp 276.593.641.866,00, dengan menggunakan rumus perhitungan efisiensi 7,19% maka dikategorikan efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi program

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAIN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAIN (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	98,06%	Program pengelolaan pendidikan	87,54%
			Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	95,20%

			Pembinaan Perpustakaan	88,14%
			Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	85,26%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja indeks pendidikan di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program pengelolaan pendidikan, Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Pembinaan Perpustakaan dan program pendidik dan tenaga kependidikan.

5. Sasaran1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pengukuran sasaran meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kesehatan pada Perjanjian Kinerja Perubahan dalam proses pengukuran capaian kinerja dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
		Target	Realisasi	
1	2	4	5	$6=5/4*100$
Indeks Kesehatan	poin	82,01	82,06	100,01%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Indeks Kesehatan	poin	81,95	82,05	82,16

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kabupaten, Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	6	7
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,05	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks kesehatan adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat atau derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dan periode tertentu, yang disusun berdasarkan satu atau beberapa indikator kesehatan, seperti angka harapan hidup, angka kematian, dan status gizi.

Indeks ini berfungsi sebagai alat untuk:

- Menilai kondisi kesehatan penduduk
 - Membandingkan tingkat kesehatan antarwilayah
 - Memantau perkembangan kesehatan dari waktu ke waktu
 - Menjadi dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan
- Secara umum indeks kesehatan menunjukkan seberapa baik kualitas kesehatan suatu masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk nilai indeks.



Adapun alasan untuk memilih indikator ini adalah;

- 1) Mewakili kondisi kesehatan masyarakat secara umum.
Indikator seperti angka harapan hidup mampu menggambarkan keadaan kesehatan penduduk secara menyeluruh, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gizi, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan.
- 2) Sensitif terhadap perubahan kondisi kesehatan.
Indikator kesehatan mudah menunjukkan perubahan akibat adanya program atau kebijakan kesehatan, misalnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak atau perbaikan sanitasi.
- 3) Data tersedia dan dapat diukur secara berkelanjutan.
Indikator yang dipilih memiliki data yang rutin dikumpulkan oleh lembaga resmi, sehingga dapat digunakan untuk pemantauan dari waktu ke waktu.
- 4) Mudah dipahami dan diinterpretasikan.
Nilai indikator indeks kesehatan mudah dimengerti oleh pengambil kebijakan dan masyarakat, sehingga efektif sebagai alat evaluasi dan perencanaan.
- 5) Dapat dibandingkan antarwilayah dan antarperiode waktu.
Penggunaan indikator yang baku memungkinkan perbandingan kondisi kesehatan antara daerah satu dengan daerah lain serta antar tahun.
- 6) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Indikator indeks kesehatan membantu pemerintah dalam menentukan prioritas program kesehatan dan alokasi sumber daya.

Berikut uraian rumus perhitungan indeks kesehatan yang umum digunakan, terutama dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan analisis kesehatan masyarakat. Indeks kesehatan umumnya dihitung menggunakan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) sebagai indikator utama.

Rumus Umum Indeks Kesehatan

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{AHH aktual} - \text{AHH minimum}}{\text{AHH maksimum} - \text{AHH minimum}}$$

- AHH aktual
Angka harapan hidup pada wilayah dan tahun tertentu.
- AHH minimum
Nilai batas bawah yang ditetapkan sebagai standar terendah (umumnya 20 tahun).

- AHH maksimum
Nilai batas atas yang ditetapkan sebagai standar tertinggi (umumnya 85 tahun).

Interpretasi Nilai Indeks

- Nilai mendekati **1** → tingkat kesehatan sangat baik
- Nilai mendekati **0** → tingkat kesehatan sangat rendah

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas bahwa relaisasi indeks kesehatan mencapai 82,05 poin dari target 82,01 poin dengan capaian tahun 2025 sebesar 100,01%. Sedangkan persentase capaian dengan target akhir tahun 2029 sebesar 99,86% dari target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 82,16 poin. Walaupun realisasi tahun 2025 melampaui target yang telah ditentukan tetapi masih terdapat potensi-potensi yang dikhawatirkan mempengaruhi capain kkerja kedepan. Untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan yang muncul, dibutuhkan strategi untuk memaksimalkan capaian target kinerja yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1) Perkuat akses dan kualitas layanan kesehatan

Menjamin layanan kesehatan bermutu dan merata menjadi fondasi utama peningkatan indeks kesehatan. Strategi ini mencakup:

- Peningkatan fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu, dan rumah sakit) sesuai standar pelayanan.
- Peningkatan tenaga kesehatan baik jumlah maupun kompetensinya (dokter, perawat, ahli gizi, promotor kesehatan, dll.).
- Perbaikan sarana dan prasarana, termasuk farmasi dan alat kesehatan yang memadai di setiap wilayah.

2) Perluas deteksi dan pencegahan penyakit melalui program pemeriksaan kesehatan

Melakukan pemeriksaan kesehatan secara massal dan berkala membantu deteksi dini penyakit sehingga tindakan pencegahan atau pengobatan bisa segera dilakukan. Di Malinau, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) telah digelar secara serentak di fasilitas kesehatan, mencakup semua kelompok usia.

Strategi lanjutan yang dilakukan :

- Jadwalkan PKG rutin secara berkala (misal mingguan/bulanan).
- Integrasikan pemeriksaan dengan kampanye kesehatan dan kegiatan lokal.
- Gunakan data hasil pemeriksaan untuk memetakan kebutuhan intervensi.

3) Perkuat sistem informasi dan monitoring kesehatan



Data yang akurat dan real-time sangat penting untuk mengukur capaian target indeks kesehatan. Penguatan sistem informasi kesehatan memungkinkan:

- Pemantauan perkembangan indikator seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi/ibu, dan stunting.
- Evaluasi capaian progres program kesehatan secara berkala.
- Penanganan cepat terhadap permasalahan yang muncul. Strategi seperti ini umum dicantumkan dalam rencana strategis kesehatan daerah yang menekankan integrasi dan pemanfaatan sistem informasi.

4) Tingkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Masyarakat yang sadar dan aktif menjaga kesehatannya memiliki dampak besar terhadap peningkatan indeks kesehatan. Upaya promosi dan pendidikan kesehatan bisa berupa:

- Penyuluhan gizi, terutama untuk ibu dan anak, demi menurunkan angka stunting.
- Edukasi pola hidup bersih dan sehat di komunitas.
- Pelibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta kelompok masyarakat (misalnya PKK dan remaja) dalam kampanye kesehatan.
- Kampanye penggunaan layanan kesehatan secara proaktif

5) Integrasi Lintas Sektor

Indeks kesehatan dipengaruhi tidak hanya layanan kesehatan, tetapi juga faktor sosial dan lingkungan. Strategi lintas sektor meliputi:

- Kolaborasi dengan sektor pendidikan dalam program sekolah sehat dan skrining kesehatan anak.
- Kerja sama dengan sektor sanitasi dan air bersih untuk mencegah penyakit menular.
- Penguatan sosial ekonomi melalui program pemberdayaan (misalnya program gizi berbasis pemanfaatan sumber daya lokal seperti pelatihan pengolahan ikan bernutrisi).

6) Optimalkan pembiayaan kesehatan

Pastikan anggaran kesehatan dari APBD, dana kesehatan (BOK/DAK), serta sumber lain (CSR, mitra pembangunan) dimanfaatkan secara efisien untuk program-program prioritas, misalnya:

- Pembiayaan layanan preventif dan promotif.
- Dukungan logistik untuk pemeriksaan massal.

- Insentif untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil.

7) Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Kebijakan

- Lakukan rapat evaluasi lintas sektor secara rutin untuk mengevaluasi capaian target dan kendala pelaksanaan program, seperti yang diterapkan di beberapa daerah untuk percepatan pencapaian target PKG.
- Tetapkan target capaian triwulanan dan indikator penilaian yang jelas.
- Berikan apresiasi/insentif bagi unit kerja atau kecamatan dengan capaian baik.

Strategi memaksimalkan pencapaian target indeks kesehatan di Kabupaten Malinau harus bersifat holistik dan berkelanjutan, mencakup:

- 1) Penguatan layanan kesehatan
- 2) Pencegahan melalui pemeriksaan rutin
- 3) Data dan monitoring yang kuat
- 4) Pemberdayaan masyarakat
- 5) Kolaborasi lintas sektor
- 6) Pembiayaan yang efisien
- 7) Evaluasi kebijakan yang berkelanjutan

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan capaian indikator, tetapi juga membangun sistem kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kendala / Permasalahan

Dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kemungkinana kendala dan permasalahan dalam mencapai target indeks kesehatan, di Kabupaten Malinau seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Aspek Penentu Indeks Kesehatan	Kendala / Permasalahan	Analisis Permasalahan	Dampak terhadap Target Indeks Kesehatan	Arah Perbaikan
1	Status Kesehatan Ibu dan Anak	Akses layanan KIA belum merata	Kondisi geografis yang luas dan terpencar menyebabkan keterbatasan jangkauan layanan kesehatan	Menurunnya kontribusi indikator KIA terhadap Indeks Kesehatan	Penguatan layanan dasar dan jemput bola
2	Prevalensi Stunting	Penurunan stunting belum sesuai target	Pendampingan keluarga berisiko stunting belum optimal dan dipengaruhi faktor sosial ekonomi	Menghambat peningkatan nilai Indeks Kesehatan	Integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif
3	Pelayanan Kesehatan Dasar	Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan	Distribusi fasilitas kesehatan belum merata antar wilayah	Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan menurun	Pemerataan sarana prasarana dan layanan
4	Sumber Daya Manusia Kesehatan	Keterbatasan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan	Minat penempatan tenaga kesehatan di wilayah terpencil masih rendah	Beban layanan meningkat dan menurunkan mutu pelayanan	Penguatan kebijakan distribusi dan insentif

No	Aspek Penentu Indeks Kesehatan	Kendala / Permasalahan	Analisis Permasalahan	Dampak terhadap Target Indeks Kesehatan	Arah Perbaikan
5	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Perubahan perilaku masyarakat berjalan lambat	Edukasi kesehatan belum berkelanjutan dan dipengaruhi faktor budaya	Tingginya risiko penyakit berbasis lingkungan	Penguatan promosi kesehatan berbasis keluarga
6	Cakupan Imunisasi	Cakupan imunisasi belum stabil	Mobilitas penduduk dan kendala penelusuran sasaran	Meningkatkan risiko kejadian penyakit yang dapat dicegah	Peningkatan pelacakan dan KIE imunisasi
7	Pembiayaan Kesehatan	Keterbatasan anggaran kesehatan daerah	Kebutuhan program lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal daerah	Intervensi kesehatan tidak dapat dilakukan secara optimal	Optimalisasi sumber pendanaan dan kolaborasi
8	Data dan Sistem Informasi Kesehatan	Data kesehatan belum sepenuhnya terintegrasi	Perbedaan sumber dan kualitas data antar sektor	Pengambilan kebijakan kurang tepat sasaran	Integrasi dan pemutakhiran data kesehatan
9	Kolaborasi Lintas Sektor	Sinergi program kesehatan lintas OPD belum optimal	Perbedaan prioritas dan mekanisme koordinasi	Program kesehatan berjalan parsial	Penguatan koordinasi dan perencanaan terpadu
10	Monitoring dan Evaluasi	Sistem monev belum sepenuhnya berbasis kinerja	Pelaporan belum real time dan analisis terbatas	Sulit mengukur kemajuan capaian indeks	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi

Pencapaian target Indeks Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2025 menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural dan operasional, terutama terkait kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, serta perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, tantangan dalam integrasi data dan kolaborasi lintas sektor turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program kesehatan. Diperlukan upaya penguatan layanan kesehatan dasar, optimalisasi sumber daya, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan guna meningkatkan capaian Indeks Kesehatan secara menyeluruh.

Strategi / Tindak Lanjut

Berikut uraian strategi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Malinau agar sesuai target

No	Fokus Permasalahan	Strategi	Tindak Lanjut	OPD Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Akses layanan kesehatan belum merata	Penguatan layanan kesehatan dasar	- Pelayanan kesehatan keliling ke wilayah terpencil- Penguatan Puskesmas dan Posyandu	Dinas Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar
2	Penurunan stunting belum optimal	Percepatan penurunan stunting terintegrasi	- Pendampingan keluarga berisiko stunting- Intervensi gizi spesifik dan sensitif	Dinas Kesehatan, Bappeda, OPD terkait	Penurunan prevalensi stunting
3	Keterbatasan SDM kesehatan	Pemerataan dan peningkatan kapasitas SDM	- Pemberian insentif tenaga kesehatan- Pelatihan dan peningkatan kompetensi	Dinas Kesehatan, BKPSDM	Meningkatnya rasio tenaga kesehatan
4	PHBS masyarakat belum optimal	Penguatan promosi dan preventif	- Kampanye PHBS berbasis keluarga dan desa- Optimalisasi GERMAS	Dinas Kesehatan, Desa	Meningkatnya perilaku hidup sehat

No	Fokus Permasalahan	Strategi	Tindak Lanjut	OPD Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
5	Cakupan imunisasi belum stabil	Intensifikasi pelayanan imunisasi	- Sweeping imunisasi- Edukasi dan pelacakan sasaran	Dinas Kesehatan	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap
6	Keterbatasan anggaran kesehatan	Optimalisasi dan sinergi pembiayaan	- Integrasi pendanaan APBD, DAK, dan desa- Kerja sama lintas sektor	Bappeda, Dinas Kesehatan	Dukungan pembiayaan program meningkat
7	Data kesehatan belum terintegrasi	Penguatan sistem informasi kesehatan	- Integrasi dan pemutakhiran data kesehatan- Pemanfaatan data untuk perencanaan	Dinas Kesehatan, Diskominfo	Data kesehatan akurat dan terintegrasi
8	Koordinasi lintas sektor belum optimal	Penguatan kolaborasi lintas OPD	- Forum koordinasi rutin- Perencanaan dan evaluasi terpadu	Bappeda, OPD terkait	Program kesehatan berjalan sinergis

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.4.4
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9 \times 100\%}{8x7}$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,01	82,05	100,01%	58.926.832.638,00	47.065.160.389,00	20,13%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(58.926.832.638,00 \times 100,01\%) - 47.065.160.389,00}{(58.926.832.638,00 \times 100,01\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 20,13\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.5
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	100,1%	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	82%
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	30,40%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	79,71%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dari tabel 3.4.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja indeks kesehatan adalah program Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat

Pengukuran sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam
pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2024 % $6=5/4*100$
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	
Indeks Ketimpangan Gender		-	0,472	0,48	98,30%
Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar		-	100	100	100%

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2030
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,480	0,48	0,407

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah atau negara. Di Indonesia khususnya di Kabupaten Malinau. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) digunakan oleh badan pusat statistik untuk mengukur kesenjangan gender pada Indeks Ketimpangan Gender (IKG), semakin kecil nilainya maka dikategorikan semakin baik (artinya ketimpangan semakin rendah).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.

Langkah-langkah penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki
2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik
3. Menghitung indeks dimensi
4. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender
5. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Formulasi untuk menghitung indeks ketimpangan gender adalah :

$$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$$

Pada tabel yang telah disajikan diatas bahwa di 2025 realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Malinau sebesar 0,48 dari target 0,472 dengan capain sebesar 98,30%. Realissi Indeks



Ketimpangan Gender untuk tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 artinya belum mengalami penurunan dari tahun 2024.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Penyebab keberhasilan yaitu;

1. Dimensi partisipasi angkatan kerja
 - Masih terdapat kesenjangan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) antara laki-laki dan perempuan.
 - Perempuan lebih banyak di sektor informal dengan produktivitas rendah.
2. Dimensi pemberdayaan
 - Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai proporsi ideal.
 - Akses pendidikan menengah / tinggi perempuan di beberapa wilayah masih terbatas.
3. Dimensi kesehatan reproduksi

Angka kelahiran remaja atau indikator kesehatan ibu belum menunjukkan perbaikan signifikan.
4. Faktor eksternal

Kondisi ekonomi yang belum stabil berdampak pada penyerapan tenaga kerja perempuan

Dengan adanya peningkatan nilai IKG Kabupaten Malinau Tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender masih belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan penguatan intervensi lintas sektor.

Alternatif solusi dan tindak lanjut yang telah dilakukan :

1. Penguatan program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Integrasi persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran
2. Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan

Pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan UMKM perempuan
3. Mendorong keterwakilan perempuan

Advokasi peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan publik dan politik
4. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
 - Program pencegahan perkawinan usia anak
 - Penguatan layanan kesehatan ibu dan remaja
5. Monitoring dan evaluasi berkala

Analisis perdimensi IKG untuk mengetahui komponen paling dominan penyumbang kenaikan

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- *E*: Efisiensi
- *PAK* : Pagu anggaran keluaran *i*
- *RAK* : Realisasi anggaran keluaran *i*
- *CK* : Capaian kinerja *i*

Tabel 3.5.2
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8 \times 7) - 9}{8 \times 7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,472	0,48	98,30%	2.017.106.468	1.991.015.121	0,41%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(2.017.106.468 \times 98,30\%) - 1.991.015.121}{(2.017.106.468 \times 98,30\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 0,41\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.3
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	98,30%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	99,34%
			Program Perlindungan Perempuan	99,75%
			Program Perlindungan Khusus Anak	88,81%
			Program Pemenuhan Hak Anak	99,62%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

Dari tabel 3.5.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja indeks ketimpangan gender di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak.

PERSENTASE KELOMPOK DISABILITAS MENGAKSES LAYANAN DASAR

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	Persen	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	Persen	100		

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Kelompok Disabilitas Mengakses Layanan Dasar adalah indikator yang menunjukkan proporsi penyandang disabilitas yang memperoleh dan memanfaatkan layanan dasar secara layak, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya. Indikator ini mencerminkan tingkat inklusivitas pembangunan daerah, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, serta menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan, program, dan sarana prasarana yang ramah disabilitas dalam mendukung akses yang setara, nondiskriminatif, dan berkelanjutan terhadap layanan dasar.

Persentase Kelompok Disabilitas Mengakses Layanan Dasar dipilih sebagai indikator kinerja karena mencerminkan tingkat inklusivitas pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas di daerah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas

kebijakan, program, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak bersifat diskriminatif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Layanan dasar umumnya meliputi:

1. Layanan Pendidikan (akses sekolah inklusi atau pendidikan khusus)
2. Layanan Kesehatan (fasilitas kesehatan, rehabilitasi, JKN, dll.)
3. Layanan Administrasi Kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran)
4. Layanan Sosial (bantuan sosial, program pemberdayaan)

Disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing.

Formulasi perhitungan

Persentase = Jumlah penyandang disabilitas yang mengakses layanan dasar / Total penyandang disabilitas sasaran

Keterangan:

- Pembilang: Jumlah penyandang disabilitas yang telah menerima layanan
- Penyebut: Total penyandang disabilitas yang terdata sebagai sasaran

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase kelompok disabilitas mengakses layanan dasar dengan target tahun berjalan ditetapkan sebesar 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kelompok disabilitas yang menjadi sasaran program telah memperoleh akses terhadap layanan dasar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pendataan yang Akurat dan Terintegrasi
Data penyandang disabilitas telah teridentifikasi dengan baik melalui basis data terpadu sehingga memudahkan intervensi program.
2. Komitmen Kebijakan Inklusif.
Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung pelayanan ramah disabilitas.
3. Koordinasi Lintas Sektor
Sinergi antara OPD terkait (kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan) dalam memastikan akses layanan dasar.
4. Peningkatan Aksesibilitas Layanan



Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih inklusif (akses fisik, informasi, dan administrasi).

5. Pendampingan dan Sosialisasi

Edukasi kepada keluarga dan masyarakat untuk mendorong kelompok disabilitas memanfaatkan layanan yang tersedia.

Analisis penyebab peningkatan/penurunan

Walaupun capaian indikator Persentase kelompok disabilitas mengakses layanan dasar mencapai 100%, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi seperti:

- Validitas dan pembaruan data secara berkala
- Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pelayanan inklusif
- Hambatan sosial dan stigma terhadap penyandang disabilitas

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk menjaga keberlanjutan capaian, langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. Pemutakhiran data penyandang disabilitas secara periodik
2. Penguatan kapasitas petugas layanan melalui pelatihan pelayanan inklusif
3. Peningkatan kualitas aksesibilitas sarana dan prasarana
4. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan tidak terjadi exclusion error
5. Penguatan kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas

Walau Capaian 100% menunjukkan bahwa target telah terpenuhi sesuai perencanaan. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan, diperlukan penguatan sistem pendataan, peningkatan kapasitas layanan inklusif, serta pengawasan berkelanjutan agar akses layanan dasar tetap merata.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.5.6
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	Persen	100	100	100	138.920.482.939,23	132.254.589.747,00	4,7%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(138.920.482.939,23 \times 100\%) - 132.254.589.747,00}{(138.920.482.939,23 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 4,7\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.7
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95,20%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

Dari tabel 3.5.10 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika

Pengukuran sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut:

Tabel. 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	58,79	-	-
Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	-	68,22	53,90	79,01%

Sumber : Dinas Budpar dan Dinas Kesehatan PP dan KB

INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	-	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	-	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai salah satu isu strategis pembangunan Indonesia, tidak hanya bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang di dalam suatu masyarakat, namun kebudayaan adalah modal dalam pembangunan. Perhitungan IPK diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis



formulasi kebijakan yang knowledge based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi daerah.

Indeks Pemajuan Kebudayaan merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam Pembangunan Kebudayaan yang bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan.

Pemajuan merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya krisis karakter yang disebabkan oleh Pengaruh Kebudayaan Asing. Dengan adanya Pemajuan Kebudayaan berdampak positif pada kelestarian dan keberlangsungan kebudayaan suatu daerah.

Untuk mengetahui Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \text{Jumlah Bobot Dimensi} \times \text{Jumlah Indeks Dimensi}$$

Tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dikarenakan Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya dilakukan pada tingkat nasional dan Provinsi. Sebagai acuan realisasi capaian, Dinas Kebudayaan mengikuti data perhitungan dari Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun beberapa Faktor yang menyebabkan indeks pembangunan kebudayaan belum bisa dihitung atau dilaksanakan di Kabupaten Malinau adalah:

- Belum tersedianya aturan yang memuat tentang petunjuk teknis penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat Kabupaten
- Belum adanya tim/OPD yang menjadi *leading sector* (Penanggung jawab) dalam melakukan penghitungan Indeks Pemajuan Kebudayaan mengingat bahwa dalam Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 7 Dimensi dan 34 Indikator, dimana masing-masing Dimensi dan Indikator berada di OPD yang berbeda.

Langkah alternatif sebagai upaya yang akan dilakukan untuk kedepannya adalah sebagai berikut :

- Melakukan Koordinasi pada Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Pemerintah Provinsi mengenai penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan
- Membentuk Tim yang bertanggung jawab/ bertugas melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Malinau.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.6.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8 \times 7) - 9 \times 100\%}{8 \times 7}$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berakarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	58,79			13.990.205.509,20	13.859.342.102,00		Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

$$\text{Efisiensi} = \frac{(13.990.205.509,20 \times \dots\%) - 13.859.342.102,00}{(13.990.205.509,20 \times \dots\%)} \times 100\%$$

Efisiensi =

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.4
Capaian Kinerja program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dari tabel 3.6.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	6	7	8
Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Poin	64,94	53,90	69,92

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Poin	59,90	67,6	67,3

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

I-Bangga adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing. I-Bangga menggambarkan kondisi keluarga secara menyeluruh melalui berbagai aspek kehidupan keluarga yang saling terkait. Indikator ini dikembangkan sebagai alat ukur kinerja pembangunan keluarga yang mencerminkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta menjadi dasar dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Indikator I-Bangga disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, antara lain:



1. Dimensi Ketenteraman dan Kemandirian Keluarga Menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemandirian ekonomi, serta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga.
2. Dimensi Ketahanan Keluarga Mencerminkan ketahanan fisik, sosial, dan psikologis keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
3. Dimensi Keharmonisan dan Relasi Keluarga Mengukur kualitas hubungan antaranggota keluarga, komunikasi, serta pola pengasuhan dalam keluarga.
4. Dimensi Kualitas Sumber Daya Manusia Keluarga Berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan perilaku hidup sehat anggota keluarga.

Indikator I-Bangga memiliki fungsi strategis sebagai:

- Alat ukur capaian pembangunan keluarga di tingkat daerah.
- Dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan keluarga yang tepat sasaran.
- Instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Pendukung pencapaian tujuan pembangunan manusia dan sosial secara berkelanjutan.

Berikut alasan pemilihan Indikator I-BANGGA (Indeks Pembangunan Keluarga) sebagai indikator utama pemerintah Kabupaten Malinau, disusun dengan konteks kondisi daerah Malinau:

- 1) Mewakili Kondisi Kesehatan Secara Holistik I-BANGGA tidak hanya menilai aspek kesehatan fisik, tetapi juga mencakup:
 - kesehatan ibu dan anak
 - status gizi keluarga
 - akses pelayanan kesehatan
 - perilaku hidup bersih dan sehat Hal ini sejalan dengan pendekatan promotif preventif yang menjadi fokus Dinas Kesehatan.
- 2) Berbasis Keluarga sebagai Unit Terkecil Pembangunan Permasalahan kesehatan di Kabupaten Malinau—seperti stunting, gizi buruk, dan kesehatan ibu-anak—berakar dari kondisi keluarga. I-BANGGA tepat digunakan karena menempatkan keluarga sebagai subjek utama intervensi kesehatan.
- 3) Relevan dengan Karakteristik Wilayah Malinau Kabupaten Malinau memiliki:
 - wilayah luas dan terpencil
 - sebaran penduduk tidak merata



- keterbatasan akses layanan kesehatan I-BANGGA mampu menggambarkan ketimpangan antarwilayah dan menjadi dasar penentuan prioritas program kesehatan.
- 4) Mendukung Program Nasional dan Lintas Sektor I-BANGGA selaras dengan:
- Program Bangga Kencana
 - percepatan penurunan stunting
 - penguatan pelayanan kesehatan primer Penggunaan indikator ini memudahkan sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten, serta memperkuat kolaborasi lintas OPD.
- 5) Sebagai Alat Perencanaan dan Evaluasi yang Terukur I-BANGGA memberikan nilai indeks yang jelas dan terukur, sehingga:
- memudahkan pemantauan capaian pembangunan kesehatan
 - menjadi dasar evaluasi kinerja program Dinas Kesehatan
 - membantu pengambilan keputusan berbasis data
- 6) **Mendorong Intervensi Tepat Sasaran** Dengan data I-BANGGA, Dinas Kesehatan dapat:
- mengidentifikasi keluarga berisiko tinggi
 - menyusun intervensi spesifik wilayah dan kelompok sasaran
 - meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran kesehatan

Formulasi perhitungan indikator

Nilai masing-masing dimensi dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Dimensi} = \frac{\text{Jumlah indikator terpenuhi}}{\text{Jumlah indikator pada dimensi}} \times 100$$

Nilai I-BANGGA merupakan **rata-rata dari ketiga dimensi**, dengan bobot yang sama:

$$\text{I-BANGGA} = \frac{\text{Nilai Ketenteraman} + \text{Nilai Kemandirian} + \text{Nilai Kebahagiaan}}{3}$$

Hasil perhitungan I-BANGGA kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

Nilai I-BANGGA	Kategori
< 40	Sangat Rendah
40 – < 60	Rendah
60 – < 80	Sedang
≥ 80	Tinggi



Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berikut Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator I-BANGGA, di Kabupaten Malinau.

No	Indikator Kinerja I-BANGGA	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Analisis Ketidakberhasilan / Kendala	Kesimpulan Analisis
1	Prevalensi Stunting	Belum mencapai target	Pelaksanaan intervensi gizi spesifik (PMT, imunisasi, TTD) telah berjalan dan didukung oleh komitmen lintas sektor	Jangkauan layanan kesehatan belum merata, keterbatasan pendampingan keluarga berisiko stunting, serta kondisi geografis	Diperlukan penguatan intervensi sensitif dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan
2	Cakupan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Meningkat	Adanya dukungan kader kesehatan, PKK, dan pelaksanaan program nasional	Jumlah dan kapasitas pendamping belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah sasaran	Perlu optimalisasi peran kader desa dan kolaborasi lintas sektor
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Meningkat	Penguatan layanan Puskesmas dan Posyandu serta dukungan JKN	Akses layanan di wilayah terpencil masih terbatas	Perlu pemerataan sarana dan tenaga kesehatan
4	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Meningkat	Edukasi ibu hamil dan dukungan pembiayaan kesehatan berjalan baik	Faktor budaya dan jarak tempuh fasilitas kesehatan di wilayah tertentu	Pendekatan berbasis kearifan lokal perlu ditingkatkan
5	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Belum stabil	Ketersediaan vaksin relatif memadai dan dilakukan kegiatan sweeping	Mobilitas penduduk dan rendahnya penerimaan sebagian masyarakat	Diperlukan penguatan KIE dan penelusuran sasaran
6	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Belum optimal	Program GERMAS telah dilaksanakan	Perubahan perilaku masyarakat memerlukan waktu dan edukasi berkelanjutan	Pendekatan promotif-preventif berbasis keluarga perlu ditingkatkan
7	Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Kesehatan Keluarga	Meningkat	Pemanfaatan sistem pelaporan dan pendataan kesehatan	Sinkronisasi data lintas OPD belum sepenuhnya optimal	Integrasi dan validasi data perlu diperkuat
8	Edukasi Gizi dan Kesehatan Keluarga	Meningkat	Peran aktif tenaga promosi kesehatan dan kader	Keterbatasan media dan metode edukasi	Perlu inovasi media KIE yang adaptif dan berkelanjutan

Secara umum, capaian indikator I-BANGGA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau menunjukkan tren peningkatan, khususnya pada indikator pelayanan kesehatan ibu dan anak serta edukasi kesehatan keluarga. Namun demikian, beberapa indikator belum mencapai

target yang ditetapkan, terutama yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, serta perlunya perubahan perilaku masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi peran kader, serta peningkatan intervensi promotif dan preventif berbasis keluarga untuk mendukung pencapaian target I-BANGGA secara berkelanjutan.

Kendala / Permasalahan

Berikut uraian Kendala/Permasalahan yang Dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau dalam Mencapai Target I-BANGGA :

No	Aspek I-BANGGA	Kendala / Permasalahan	Akar Permasalahan	Dampak terhadap Target	Keterangan
1	Penurunan Stunting	Cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting belum optimal	- Wilayah geografis luas dan sulit dijangkau- Keterbatasan tenaga kesehatan dan kader	Target penurunan stunting tidak tercapai optimal	Terutama di desa terpencil dan perbatasan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Akses layanan KIA belum merata	- Sarana prasarana kesehatan terbatas- Distribusi tenaga kesehatan belum seimbang	Risiko kematian ibu dan bayi masih ada	Membutuhkan penguatan layanan dasar
3	Perubahan Perilaku Kesehatan	Rendahnya kesadaran keluarga terhadap pola hidup sehat	- Faktor sosial budaya- Edukasi kesehatan belum berkelanjutan	Intervensi kesehatan kurang efektif	Perlu pendekatan berbasis budaya lokal
4	Kolaborasi Lintas Sektor	Koordinasi lintas OPD belum optimal	- Perbedaan prioritas program- Mekanisme koordinasi belum terstruktur	Program I-BANGGA berjalan parsial	Integrasi program belum maksimal
5	Kualitas Data Kesehatan	Data keluarga dan data kesehatan belum sepenuhnya sinkron	- Pemutakhiran data tidak rutin- Perbedaan sumber dan sistem data	Penetapan sasaran kurang tepat	Perlu integrasi data kesehatan dan KB
6	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan	- Rekrutmen dan pemerataan SDM terbatas- Beban kerja tinggi	Pelayanan dan pendampingan tidak optimal	Kader kesehatan sangat dibutuhkan
7	Pendanaan Program	Keterbatasan anggaran untuk intervensi spesifik I-BANGGA	- Ketergantungan pada APBD- Prioritas anggaran terbatas	Skala dan jangkauan program terbatas	Perlu dukungan lintas pendanaan
8	Monitoring dan Evaluasi	Sistem monitoring belum terintegrasi	- Pelaporan manual dan tidak real-time- Keterbatasan kapasitas evaluasi	Sulit mengukur capaian program	Perlu penguatan sistem monev

Strategi / Tindak Lanjut

Berikut uraian Strategi / Tindak Lanjut dalam Pencapaian Program I-BANGGA di Kabupaten Malinau

No	Aspek I-BANGGA	Strategi	Tindak Lanjut	Pelaksana Utama	Indikator Keberhasilan
1	Penguatan Ketahanan Keluarga	Peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak	- Pembinaan keluarga melalui BKB, BKR, dan BKL- Edukasi pengasuhan berbasis kearifan lokal	DP3A/OPD KB, PKK, Desa	Meningkatnya jumlah keluarga aktif mengikuti kelompok bina keluarga
2	Penurunan Stunting	Integrasi program keluarga dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif	- Pendampingan keluarga berisiko stunting- Edukasi gizi dan kesehatan reproduksi	Dinas Kesehatan PP KB, Puskesmas, Kader	Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Malinau
3	Peningkatan Kualitas SDM	Penguatan perencanaan keluarga dan usia perkawinan ideal	- Sosialisasi GenRe di sekolah dan masyarakat- Konseling remaja	Dinkes PPKB, Sekolah, PIK-R	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
4	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Penguatan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA	- Pelatihan kewirausahaan keluarga- Fasilitas akses permodalan	Dinkes PPKB, Dinas Koperasi, Desa	Bertambahnya kelompok UPPKA yang aktif dan mandiri
5	Peningkatan Akses Layanan KB	Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan KB	- Pelayanan KB keliling ke wilayah terpencil- Penyediaan alat kontrasepsi	Dinkes PPKB Puskesmas	Meningkatnya CPR dan kepesertaan KB aktif
6	Penguatan Kelembagaan	Optimalisasi peran tim dan kader I-BANGGA di tingkat desa	- Pembinaan dan pelatihan kader- Penguatan koordinasi lintas sektor	Dinkes PPKB, Kecamatan, Desa	Kader aktif dan kelembagaan I-BANGGA berjalan efektif
7	Pemanfaatan Data Keluarga	Penggunaan data keluarga sebagai dasar intervensi	- Pemutakhiran data keluarga- Analisis dan pemetaan keluarga sasaran	Dinkes PPKB, Desa	Data keluarga valid dan dimanfaatkan dalam perencanaan
8	Edukasi dan Komunikasi	Penguatan KIE berbasis budaya lokal	- Kampanye I-BANGGA melalui media lokal- Edukasi langsung ke masyarakat	Dinkes PPKB, Media, Tokoh Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang I-BANGGA

Strategi dan tindak lanjut tersebut diarahkan untuk meningkatkan capaian I-BANGGA secara terukur dan berkelanjutan melalui pendekatan keluarga, penguatan layanan kesehatan primer, serta sinergi lintas sektor sesuai karakteristik Kabupaten Malinau.

Secara umum, penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Malinau pada Tahun 2025 telah menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai

program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendukung pencapaian target Indeks Kesehatan daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain kondisi geografis wilayah yang luas dan terpencar, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, serta perlunya perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan. Kendala tersebut berpengaruh terhadap capaian beberapa indikator kesehatan yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Malinau akan terus memperkuat komitmen dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan layanan kesehatan dasar yang merata, penguatan promosi dan upaya preventif, serta percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Selain itu, penguatan sistem informasi kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, serta optimalisasi sumber pembiayaan akan menjadi fokus kebijakan guna mendukung peningkatan Indeks Kesehatan secara berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Malinau dapat terus ditingkatkan sebagai bagian integral dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.6.7
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Poin	68,22	53,90	79,01%	44.116.906.270,00	21.871.061.601,00	37,25%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(44.116.906.270,00 \times 79,01\%) - 21.871.061.601,00}{(44.116.906.270,00 \times 79,01\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 37,25\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.8
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	79,01%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	76,76%
			Program Rehabilitasi Sosial	98,75 %
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	48,11
			Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	54,93

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dari tabel 3.6.10 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Rehabilitasi Sosial, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Pengukuran sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Tingkat Kemiskinan	Persen	-	6,64	5,56	116,26%
Tingkat Pengangguran Terbuk	Persen	-	3,07	3,42	88,59%
Indeks Gini		-	0,275	0,249	109,4%

Sumber : Bappeda dan Dinas ketenagakerjaan Tahun 2025

TINGKAT KEMISKINAN

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,94	5,56	5,42

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,56	-	-

Sumber : Bappeda Tahun 2025

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara sederhana, indikator ini

digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk di suatu wilayah tidak mampu memenuhi standar hidup minimum secara ekonomi, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Lima Program Inovasi Daerah perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Optimalisasi program unggulan seperti PESAT, hingga Desa Sarjana Unggul harus terus ditingkatkan untuk memastikan intervensi pemerintah menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Berdasarkan data BPS Malinau, angka kemiskinan telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 6,94% pada 2024 menjadi 5,56% di tahun 2025. Ke depan, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan desa menjadi kunci agar program pemberdayaan ekonomi dan perbaikan rumah layak huni memberikan dampak yang lebih masif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Malinau secara inklusif.

Tabel 3.7.3

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Malinau, Tahun 2024 - 2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
2024	6,45	6,94
2025	5,24	5,56

Sumber: Statisti Kabupaten Malinau Tahun 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 3.7.4

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
1	2	3
2024	0,57	0,06
2025	0,25	0,01

Sumber: Statisti Kabupaten Malinau tahun 2025



Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas maka diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau pada tahun 2025 sebesar 5,24 ribu (5,56 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 6,45 ribu (6,94 persen), jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 1,21 ribu jiwa dan secara persentase turun 1,38 persen.

Pada periode 2024 - 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, dari 0,57 pada tahun 2024 menjadi 0,25 pada tahun 2025. Hal serupa terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengalami penurunan dari 0,06 menjadi 0,01.

Analisis penyebab keberhasilan

Faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah perbatasan dan struktur ekonomi masyarakatnya.

Adapun beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau mengalami penurunan adalah:

- Adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan.
- Peningkatan pendapatan masyarakat lewat pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- Optimalisasi program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau seperti PESAT, hingga Desa Sarjana Unggul harus terus ditingkatkan untuk memastikan intervensi pemerintah menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan.

Analisis faktor penghambat

Selain faktor keberhasilan masih juga terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau:

- Tantangan Geografis dan Aksesibilitas Dimana wilayah Malinau yang sangat luas dengan topografi hutan dan pegunungan membuat biaya logistik sangat tinggi. Sulitnya jangkauan transportasi ke daerah pedalaman dan perbatasan menyebabkan harga barang kebutuhan pokok menjadi mahal, yang secara langsung menekan daya beli masyarakat miskin.
- Konektivitas infrastruktur dasar belum merata. Masih terdapat infrastruktur jalan dan jembatan yang menghambat mobilitas hasil pertanian masyarakat desa ke pusat pasar. Hal ini membuat petani sulit mendapatkan keuntungan maksimal dari produk mereka.
- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas di beberapa wilayah pedalaman menjadi hambatan bagi masyarakat untuk

mengakses lapangan kerja sektor formal atau mengembangkan usaha mandiri yang kompetitif.

- Keterbatasan Lapangan Kerja Non-Sektor Primer: Ekonomi Malinau masih sangat bergantung pada sektor alam dan jasa pemerintahan. Kurangnya diversifikasi industri atau sektor pengolahan membuat peluang kerja bagi angkatan muda menjadi terbatas.
- Faktor Internal dan Budaya: Terdapat pengaruh dari faktor internal individu atau keluarga, seperti kurangnya motivasi usaha atau ketergantungan pada bantuan, yang menurut BPS Kabupaten Malinau turut menjadi pemicu kemiskinan di beberapa kantong wilayah.
- Kesenjangan Kota dan Desa: Terjadi ketimpangan pembangunan yang cukup lebar antara pusat kabupaten dengan desa-desa di perbatasan, di mana fasilitas kesehatan dan pendidikan berkualitas masih terpusat di wilayah perkotaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Alternatif atau solusi yang dilakukan untuk menekan tingkat kemiskinan adalah:

- Mendorong pengembangan UMKM kepada masyarakat umum
- Membuat jalan tani untuk mobilitas hasil pertanian masyarakat.
- Membuat pelatihan UMKM untuk masyarakat umum
- Meningkatkan keterampilan yang terbatas di beberapa wilayah pedalaman

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.7.5
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,64	5,56	116,26%	1.294.725.000,00	1.249.894.000,00	16,96%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Bappeda Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1.294.725.000,00 \times 116,26) - 1.249.894.000,00}{(1.294.725.000,00 \times 116,26)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 16,96 \%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	116,26%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	96,53%

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Dari tabel 3.7.6 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	4	5	6
Tingkat Pengangguran Terbuka	Pesen	3,10%	3,42%	2,95%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,42		

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Indikator ini mencerminkan kondisi pasar kerja di suatu daerah serta kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat digunakan untuk menilai tingkat penyerapan tenaga kerja dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat secara objektif.

Tingkat Pengangguran Terbuka dipilih sebagai indikator kinerja karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan kualitas pembangunan ekonomi daerah. Indikator ini relevan, terukur, dan sensitif terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, sehingga efektif digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor-sektor produktif yang berkelanjutan.

Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan diatas dapat diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 mengalami kenaikan angka pengangguran di rentang 0,32% dari 3,10 % di tahun 2024 menjadi 3,42 % di tahun 2025.

Kenaikan angka ini bukan disebabkan karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi makin banyak lulusan baru SMA/Sederajat maupun serjana muda yang aktif di pasar kerja.

Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh masuknya lulusan baru dan dominasi tenaga kerja perempuan yang belum terserap optimal. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya kinerja dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu:

Faktor Internal

- Kualitas SDM belum sesuai kebutuhan industri lokal Banyak lulusan baru belum memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan sektor utama Malinau (perkebunan, kehutanan, pertambangan, jasa).
- Keterbatasan lapangan kerja formal Pertumbuhan ekonomi daerah belum cukup cepat untuk menyerap tambahan tenaga kerja setiap tahun.
- Ketidakcocokan gender dalam sektor kerja Tenaga kerja perempuan lebih banyak masuk ke sektor jasa, sementara dominasi lapangan kerja di Malinau masih di sektor primer (pertanian, kehutanan, tambang).

Faktor Eksternal

- Perlambatan ekonomi regional
Fluktuasi harga komoditas (batubara, kelapa sawit) memengaruhi daya serap tenaga kerja.
- Urbanisasi dan migrasi tenaga kerja
Sebagian angkatan kerja lebih memilih mencari peluang di Tarakan atau kota besar lain, sehingga terjadi mismatch antara supply dan demand tenaga kerja lokal

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun beberapa Alternatif Solusi yang akan dilakukan dalam jangka Panjang Adalah sebagai berikut :

- rogram pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal (misalnya keterampilan teknis pertambangan, agroindustri, pariwisata).
- Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif untuk menyerap tenaga kerja perempuan dan lulusan baru.
- Kemitraan pemerintah–swasta dalam membuka lapangan kerja baru melalui investasi daerah.
- Peningkatan akses informasi pasar kerja agar lulusan baru lebih cepat terserap.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.7.9
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,07	3,42	111,40%	5.365.653.800,00	4.021.945.151,00	32,71%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(4.726.166.400,00 \times 111,40\%) - 3.585.385.893,00}{(4.726.166.400,00 \times 111,40\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 37,71\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.10
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	111,40%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	75,86%

			Program Penempatan Tenaga Kerja	68,26%
--	--	--	---------------------------------	--------

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja.

INDEKS GINI

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.11
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Indeks Gini	Poin	-	0,249	0,255

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Tabel 3.7.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Gini	Poin	0,249		

Sumber : Bappeda Tahun 2025

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah, dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan pemerataan yang semakin baik dan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat serta menjadi gambaran kondisi keadilan sosial dan struktur ekonomi daerah secara komprehensif.

Indeks Gini dipilih sebagai indikator kinerja karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai tingkat pemerataan hasil pembangunan di daerah. Indikator ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu wilayah atau negara.

Indeks Gini menunjukkan seberapa merata atau tidak meratanya pendapatan masyarakat:

- **Nilai mendekati 0** → pendapatan semakin **merata**
- **Nilai mendekati 1** → pendapatan semakin **timpang**

Rentang nilai Indeks Gini

- **0,00 – 0,30** → ketimpangan rendah
- **0,31 – 0,40** → ketimpangan sedang
- **> 0,40** → ketimpangan tinggi

Indeks Gini penting untuk:

- Menilai keadilan ekonomi
- Menjadi dasar perumusan kebijakan pemerataan kesejahteraan
- Membandingkan tingkat ketimpangan antarwilayah atau waktu

Formulasi yang dipakai untuk menghitung indeks gini adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$$

Dari tabel yang telah di tampilkan diatas Capaian Indeks Gini Kabupaten Malinau sebesar 0,249 yang melampaui target 0,275 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang rendah (semakin mendekati nol, distribusi pendapatan semakin merata).



Berdasarkan evaluasi kinerja daerah, berikut adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan tersebut:

1. Efektivitas Program Inovatif Daerah: Implementasi program unggulan seperti Milenial Mandiri Dimana salah satu fokus utama program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di kalangan milenial. Melalui pelatihan kewirausahaan, para peserta didorong untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan. Program ini juga membantu mereka mengakses modal, bimbingan, dan jaringan bisnis.
2. Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Malinau menjadi salah satu daerah yang berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% melalui intervensi yang terfokus pada masyarakat lapisan terbawah (desil 1), sehingga mempersempit jarak pendapatan dengan kelompok menengah.
3. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: seperti Program “Desa Sarjana Unggul dan Program WM Maju (Wajib Belajar Malinau Maju)” meningkatkan kapasitas intelektual dan kemandirian ekonomi di tingkat desa, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.
4. Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bantuan perbaikan rumah layak huni serta perlengkapan anak sekolah membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah.
5. Pemerataan Infrastruktur Dasar di Perbatasan: Pembangunan yang difokuskan pada wilayah pedalaman dan perbatasan meningkatkan aksesibilitas ekonomi, sehingga masyarakat di daerah terpencil memiliki peluang pendapatan yang setara dengan wilayah perkotaan.
6. Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok: Upaya pengendalian inflasi melalui pemantauan ketersediaan barang di pasar rakyat dan agen secara rutin (realisasi kegiatan 100% berhasil) menjaga daya beli masyarakat ekonomi bawah.

Selanjutnya rekomendasi tindak lanjut untuk memperbaiki indikator Indeks Gini difokuskan pada kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Strategi ini diimplementasikan melalui penguatan sektor ekonomi produktif, perluasan kesempatan kerja, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, diperlukan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- *E* : Efisiensi
- *PAK* : Pagu anggaran keluaran *i*
- *RAK* : Realisasi anggaran keluaran *i*
- *CK* : Capaian kinerja *i*

Tabel 3.7.13
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi (8x7)-9 x 100% 8x7	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Gini	Poin	0,275	0,249	109,4%	350.554.600,00	317.970.419,00	17,08%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Bappeda Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(350.554.600,00 \times 109,40\%) - 317.970.419,00}{(350.554.600,00 \times 109,40\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 17,08\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.14
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Gini	109,40%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMMKM)	90,70%

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja indeks gini di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMMKM)

Misi 2 : Pengembangan Ekonomi Lokal

Tujuan 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan

Pengukuran sasaran Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan dengan indikator kinerja sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dan Kontribusi

Sektor Perikanan terhadap PDRB, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Sektor Unggulan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 % $6=5/4*100$
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	-	9,77	9,37	95,90%
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB		-	2,11	2,07	98,10%
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		-	2,06	2,21	107,28%
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		-	0,98		

Sumber : Dinas Pertanian, Dina perindag, Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Tahun 2025

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	-	9,37	11,81

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	9,37	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB adalah indikator yang menunjukkan besarnya peran sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, yang diukur berdasarkan persentase nilai tambah sektor pertanian terhadap total PDRB. Indikator ini mencerminkan tingkat ketergantungan dan kekuatan ekonomi daerah pada sektor pertanian, sekaligus menggambarkan peran sektor tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan bahan pangan secara berkelanjutan.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dipilih sebagai indikator kinerja karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam struktur perekonomian daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan pertanian, peningkatan produktivitas, serta nilai tambah hasil pertanian, sehingga menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Formulasi untuk perhitungan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas indicator kinerja kontribusi sector pertanian terhadap PDRB tahun 2025 dengan target 9,77, realisasi 9,37 dan capaian kinerja 95,90%. Sedangkan untuk perbandingan realisasi tahun tahun sebelumnya tidak dapat disajikan dikarenakan indikator kinerja ini baru dilaksanakan ditahun 2025 berdasar RPJMD tahun 2025-2029. Berdasarkan tabel perbandingan dengan target jangka menengah atau akhir tahun 2029 indikator kinerja kontribusi sector pertanian terhadap PDRB telah mencapai 79,33%.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.8.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8 \times 7) - 9}{8 \times 7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	9,77	9,37	95,90%	39.345.073.529,00	38.359.715.781,40	-1,6%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(39.345.073.529,00 \times 95,90\%) - 38.359.715.781,40}{(39.345.073.529,00 \times 95,90\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = -1,6%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	95,90%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	97,63%
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	88,15%
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	99,16%

Sumber : Dinas Pertanian 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan Kerawanan Pangan.

KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN TERHADAP PDRB

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen		2,07%	2,27%

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	2,07	-	-

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB adalah indikator yang menunjukkan besarnya sumbangan sektor perindustrian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, yang diukur berdasarkan persentase nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total PDRB. Indikator ini mencerminkan tingkat perkembangan industrialisasi daerah, kemampuan sektor industri dalam

menciptakan nilai tambah, serta perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diversifikasi struktur ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah.

Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB dipilih sebagai indikator kinerja karena sektor perindustrian merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural perekonomian daerah. Indikator ini relevan, terukur, dan strategis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan industri, peningkatan investasi, serta penguatan rantai nilai dan penyerapan tenaga kerja, sehingga mendukung pencapaian pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Formulasi untuk menghitung Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB adalah :

$$\frac{PDRB \text{ ADHB Kategori industri pengolahan}}{PDRB \text{ ADHB Total}} \times 100\%$$

Dari tabel yang telah disajikan diatas untuk indikator kinerja Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan target tahun 2025 sebesar 2,11, realisasi 2,07 dan capaian kinerja 98,10%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil capaian yang telah disajikan pada tabel diatas maka untuk indikator kinerja kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB realisasi capaian belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi realisasi mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja
2. Iklim pendukung dan tenaga kurang
3. Tidak tersedianya lokasi industri dan transportasi

Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun solusi yang telah dilakukan untuk mengurai penyebab kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan yaitu;

1. Teknologi yang memadai (Digitalisasi)
2. Kursus dan pelatihan
3. Inovasi bagi dunia usaha
4. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.8.7
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	2,11	2,07	98,10%	350.554.600,00	317.970.419,00	7,53%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(350.554.600,00 \times 98,10\%) - 317.970.419,00}{(350.554.600,00 \times 98,10\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 7,53\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8.8
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	98,10%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	90,70%

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	-	2,21	2,20

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,21	-	-

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Formulasi unruk menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- *E* : Efisiensi
- *PAK* : Pagu anggaran keluaran *i*
- *RAK* : Realisasi anggaran keluaran *i*
- *CK* : Capaian kinerja *i*

Tabel 3.8.11
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9 \times 100\%}{8x7}$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,06	2,21	107,28%	9.846.602.057,95	9.622.917.811,00	8,90%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(9.846.602.057,95 \times 107,28\%) - 9.622.917.811,00,-}{(9.846.602.057,95 \times 107,28\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 8,90\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8.12
Capaian Kinerja program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAAN (%)
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	107,28%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	97,52%
			Program Pemasaran Pariwisata	96,51%
			Program Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	99,43%

Sumber : Dinas

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB adalah program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.13
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2026
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	-	-	1,18

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB				

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB adalah indikator yang menunjukkan besarnya sumbangan sektor perikanan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, yang diukur berdasarkan persentase nilai tambah bruto sektor perikanan—baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya—terhadap total PDRB. Indikator ini mencerminkan peran sektor perikanan dalam struktur perekonomian daerah, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan sumber pangan, serta penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan.

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB dipilih sebagai indikator kinerja karena sektor perikanan merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Indikator ini relevan dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan perikanan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Formulasi untuk menghitung Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.8.15
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9 \times 100\%}{8x7}$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	persen	0,98			1.691.186.225,00	1.596.515.860,00		Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1.691.186.225,00 \times \dots\%) - 1.596.515.860,00,-}{(1.691.186.225,00 \times \dots\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \dots\dots\dots$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8.16
Capaian Kinerja program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	94,40%

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Dalam Arti Luas

Pengukuran sasaran Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Dalam Arti Luas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sector pertanian	Persen		5,94		

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sector pertanian	Persen	-	-	7,04

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sector pertanian				

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pertumbuhan Nilai Produksi Pengolahan Sektor Pertanian adalah indikator yang menggambarkan peningkatan nilai output dari kegiatan pengolahan hasil pertanian dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini

mencerminkan perkembangan agroindustri dan tingkat penciptaan nilai tambah terhadap komoditas pertanian, sekaligus menunjukkan kemampuan daerah dalam mengolah hasil pertanian primer menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi yang berdaya saing.

Indikator ini dipilih karena pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian menjadi ukuran penting keberhasilan strategi hilirisasi dan penguatan rantai nilai pertanian di daerah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, peningkatan produktivitas dan kualitas produk, serta perluasan kesempatan kerja, sehingga mendukung transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.9.3
Tabel Pengukuran Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9 \times 100\%}{8x7}$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	Persen	0,98			3.119.184.150,00	2.739.267.841,00		Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN (%)
Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sector pertanian		Program Penyuluhan Pertanian	87,82%

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sector pertanian di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Penyuluhan Pertanian.

8. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi

Pengukuran sasaran Meningkatnya Realisasi nilai investasi dan indikator kinerja sasaran Pertumbuhan realisasi investasi daerah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 % $6=5/4*100$
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Pertumbuhan realisasi investasi daerah	Persen	-	54,87	-5,4	-9,84%

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2026
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Pertumbuhan realisasi investasi daerah	Persen	-	-5,4	1,00

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	persen	-5,4		

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025



a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah adalah indikator yang menggambarkan peningkatan nilai realisasi penanaman modal di suatu daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Indikator ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor, iklim investasi daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong masuknya modal untuk mendukung kegiatan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator ini dipilih karena realisasi investasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pertumbuhan realisasi investasi bersifat terukur dan relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam perbaikan iklim usaha, penyederhanaan perizinan, dan penyediaan infrastruktur pendukung, sehingga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan peningkatan daya saing dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas dapat diketahui bahwa capain indicator kinerja Pertumbuhan realisasi investasi daerah adalah -9,84% atau dengan kata lain target tidak tercapai ditahun 2025 ini. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi atas target yang telah ditentukan yakni :

- Keterbatasan SDM yang memahami regulasi investasi kompleks
- Koordinasi antar SKPD yang belum optimal
- Database dan peta potensi investasi yang belum lengkap
- Promosi investasi daerah yang belum maksimal
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan media promosi (seperti pembuatan video, buku, penyewaan media promosi untuk ditampilkan diruang publik)
- Sistem monitoring pelaporan realisasi investasi yang belum efektif

Untuk memperbaiki capain yang tidak tercapai ditahun ini maka ad beberapa solusi maupun strategi untuk mencapai target yg telah ditentuka yakni:

- Melaksanakan pelatihan teknis (bimtek) regulasi investasi dan OSS-RBA bagi seluruh petugas terkait secara bertahap.
- Membentuk dan mengaktifkan forum koordinasi investasi lintas SKPD dengan jadwal pertemuan rutin.

- Melakukan pemutakhiran dan penyusunan database potensi investasi daerah secara terpadu.
- Mengoptimalkan promosi investasi melalui media digital
- Memprioritaskan penggunaan anggaran pada media promosi
- Meningkatkan pendampingan dan pengawasan pelaporan LKPM melalui sistem OSS.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.10.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	Persen	54,87	-5,4	-9,84%	46.999.100,00	37.118.430	90	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(46.999.100,00 \times -9,84\%) - 37.118.430,-}{(46.999.100,00 \times 9,84\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 90$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	-9,84%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78,97%

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Pertumbuhan realisasi investasi daerah di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

9. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Infrastruktur Pendukung Investasi

Pengukuran sasaran Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi dan indikator kinerja sasaran Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap,

dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Terwujudnya Infrastruktur Pendukung Investasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6=5/4*100
Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	Persen	26,67	74,69	280%

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2026
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	Persen		74,69	53,33

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	Persen	74,69		

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Infrastruktur Daerah Penunjang Investasi yang dalam Kondisi Mantap adalah indikator yang menggambarkan proporsi infrastruktur strategis daerah—seperti jalan, jembatan, jaringan utilitas, kawasan industri, dan sarana pendukung lainnya—yang berada dalam kondisi baik dan layak fungsi untuk mendukung kegiatan investasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kualitas infrastruktur daerah dalam menunjang kelancaran distribusi, mobilitas barang dan jasa, serta operasional dunia usaha secara efektif dan berkelanjutan.

Indikator ini dipilih karena ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap bersifat terukur dan relevan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis, serta menjadi dasar penilaian efektivitas kebijakan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas bahwa capain indikator kinerja pertumbuhan realisasi investasi daerah -9,84% dari target 5,94 dan realisasi -5,4.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dalam melaksanakan indikator kinerja ini terdapat bebarapa factor penyebab sehingga realisasi tidak mencapai gtarget yang telah ditentukan yaitu;

- a) Keterbatasan SDM yang memahami regulasi investasi kompleks
- b) Koordinasi antar SKPD yang belum optimal
- c) Database dan peta potensi investasi yang belum lengkap
- d) Promosi investasi daerah yang belum maksimal
- e) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan media promosi (seperti pembuatan video, buku, penyewaan media promosi untuk ditampilkan diruang publik)
- f) Sistem monitoring pelaporan realisasi investasi yang belum efektif

2. Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan untuk perbaikan kedepan yakni:

- a) Melaksanakan pelatihan teknis (bimtek) regulasi investasi dan OSS-RBA bagi seluruh petugas terkait secara bertahap.
- b) Membentuk dan mengaktifkan forum koordinasi investasi lintas SKPD dengan jadwal pertemuan rutin.

- c) Melakukan pemutakhiran dan penyusunan database potensi investasi daerah secara terpadu
- d) Mengoptimalkan promosi investasi melalui media digital
- e) Memprioritaskan penggunaan anggaran pada media promosi
- f) Meningkatkan pendampingan dan pengawasan pelaporan LKPM melalui sistem OSS.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.11.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	Persen	26,67	74,69	280%	668.841.300,00	650.634.060,00	0,65%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(668.841.300,00 \times 280\%) - 650.634.060,00}{(668.841.300,00 \times 280\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 0,65\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	280%	Program Pelayanan Penanaman Modal	99,19%
			Program Hubungan Industrial	96,74%

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Hubungan Industrial.

10. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan indikator kinerja sasaran Rasio Kemandirian Fiskal dan Laju inflasi daerah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Rasio Kemandirian Fiskal	Poin		4,30	5,21	121,16%
Laju inflasi daerah	Persen		2,5	2,230	89,2%

Sumber : BPKD dan Bappeda tahun 2025

RASIO KEMANDIRIAN FISKAL

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2026
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Rasio Kemandirian Fiskal	Poin		5,21	4,85

Sumber : BPKD Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12.2**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Poin	5,21		

Sumber : BPKD Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Rasio Kemandirian Fiskal adalah indikator yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Indikator ini mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan serta kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan.

Rasio Kemandirian Fiskal dipilih sebagai indikator kinerja karena menunjukkan kekuatan dan kesehatan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan PAD, serta efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan, sehingga menjadi dasar penting dalam evaluasi kemampuan daerah mewujudkan pembangunan yang mandiri, akuntabel, dan berkesinambungan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- *E* : Efisiensi
- *PAK* : Pagu anggaran keluaran *i*
- *RAK* : Realisasi anggaran keluaran *i*
- *CK* : Capaian kinerja *i*

Tabel 3.12.3

Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Poin	4,30	5,21	121,16%	26.849.494.660,00	23.870.884.501,00	26,6%%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : BPKD Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(26.849.494.660,00 \times 121,16\%) - 23.870.884.501,00}{(26.849.494.660,00 \times 121,16\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 26,2\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya

berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	121,16%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	85,40%
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	93,61%
			Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	79,25%

LAJU INFLASI DAERAH

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Laju inflasi daerah			2,230	2,5 ± 1

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12.6**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Laju inflasi daerah		2,230		

*Sumber : Bappeda Tahun 2025***a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Laju inflasi adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase kenaikan harga barang dan jasa secara kolektif dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Angka ini berfungsi sebagai barometer untuk melihat seberapa cepat harga-harga di pasar melonjak, yang secara langsung berimbas pada penurunan daya beli mata uang. Ketika laju inflasi merangkak naik, nilai nominal uang yang kita miliki menjadi terpengkas secara riil; artinya, jumlah uang yang sama tidak lagi mampu mendapatkan jumlah barang yang sama seperti periode sebelumnya. Jika tidak dikendalikan, fenomena ini tidak hanya membebani biaya hidup masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang menghambat pertumbuhan investasi dan stabilitas pasar.

Berdasarkan data terkini hingga Maret 2026, analisis penyebab keberhasilan dan tantangan (kegagalan) indikator laju inflasi di Kabupaten Malinau dapat dirinci sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan Pengendalian Inflasi

Keberhasilan menjaga stabilitas harga di Malinau didorong oleh intervensi aktif pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan melakukan:

- Penyelenggaraan Pasar Murah: Pemerintah Kabupaten Malinau secara rutin menggelar pasar murah, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri, untuk menekan lonjakan harga bahan pokok.
- Sidak Pasar dan Pengawasan Stok: TPID melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala ke pasar-pasar induk untuk memastikan ketersediaan pasokan dan mencegah penimbunan barang oleh pedagang.



- Optimalisasi Program Pro-Rakyat: program-program bantuan sosial dan penguatan ekonomi lokal tetap berjalan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga global.
- Koordinasi Pusat-Daerah: Kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat dalam Rakor Pengendalian Inflasi membantu daerah menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal lokal.

Faktor Tantangan/Kegagalan Indikator Inflasi

Beberapa faktor struktural dan musiman seringkali menyebabkan laju inflasi di Malinau sulit ditekan atau melampaui target:

- Kendala Distribusi Logistik: Tantangan utama adalah letak geografis yang sulit, sehingga biaya distribusi barang dari luar daerah sangat tinggi dan rentan terhadap gangguan cuaca atau infrastruktur jalan.
- Ketergantungan Pasokan Luar: Sebagian besar komoditas pangan pokok masih didatangkan dari luar kabupaten. Ketimpangan antara permintaan lokal dan keterlambatan pasokan sering memicu kenaikan harga mendadak.
- Tekanan Musiman (Ramadan & Idulfitri): Secara historis, periode survei sosial ekonomi mencatat kenaikan harga tertinggi pada momen-momen besar keagamaan karena lonjakan permintaan masyarakat.
- Fluktuasi Harga Komoditas Global: Kenaikan harga emas perhiasan dan tarif energi (seperti listrik) di tingkat provinsi Kalimantan Utara turut memberikan tekanan inflasi pada level kabupaten.
- Keterbatasan Ruang Fiskal: Penurunan APBD Malinau pada tahun 2026 (turun sekitar Rp 800 miliar) membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi pasar yang masif jika terjadi lonjakan harga yang ekstrim.

Pemerintah Kabupaten Malinau secara aktif menerapkan strategi terpadu untuk menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan yang menjadi pemicu utama inflasi daerah. Langkah strategis ini ditempuh melalui koordinasi intensif di bawah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan mengintegrasikan kebijakan hulu hingga hilir guna memitigasi fluktuasi harga di pasar. Upaya tersebut mencakup pemantauan stok secara berkala di tingkat distributor, penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menasar wilayah-wilayah rentan, hingga optimalisasi sektor pertanian lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah yang sering terkendala masalah logistik. Dengan memastikan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga, Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim

ekonomi yang kondusif demi mencegah lonjakan inflasi yang dapat menghambat pertumbuhan pembangunan daerah.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.12.7
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8 \times 7) - 9}{8 \times 7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Laju inflasi daerah	Persen	2,5	2,230	89,2%	83.222.000,00	81.146.970,00	-9,31%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Bappeda Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(83.222.000,00 \times 89,2\%) - 81.146.970,00}{(83.222.000,00 \times 89,2\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = -9,31\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.8
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Laju inflasi daerah	89,2%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	97,50%

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Laju inflasi daerah didukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Misi 3 : Peningkatan Infrastruktur

Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah

11. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Wilayah

Pengukuran sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran indeks konektivitas, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Indeks Konektivitas	Poin		0,50	0,347	69,4%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2026
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Indeks Konektivitas	Poin		0,347	0,70

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13.2**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin			

*Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025***a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Indeks Konektivitas Wilayah adalah indikator yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah dalam suatu daerah melalui ketersediaan, kualitas, dan keterpaduan jaringan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Indeks ini mencerminkan kemudahan akses dan mobilitas orang, barang, dan jasa antarwilayah, serta menunjukkan sejauh mana infrastruktur konektivitas mampu mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Indeks Konektivitas Wilayah dipilih sebagai indikator kinerja karena konektivitas yang baik merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur transportasi dan jaringan pendukung, serta menjadi dasar evaluasi kebijakan dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi distribusi, dan integrasi wilayah, sehingga mendukung percepatan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.13.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	0,50	0,347	69,4%	358.006.653.750,71	331.481.029.408,00	-33%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(358.006.653.750,71 \times 69,4\%) - 331.481.029.408,00}{(358.006.653.750,71 \times 69,4\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = -33\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	69,4%	Program Penyelenggaraan Jalan	91,82%
			Program Perekonomian dan Pembangunan	95,22%

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Indeks Konektivitas di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Penyelenggaraan Jalan dan Program Perekonomian dan Pembangunan.

12. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah

Pengukuran sasaran Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah dengan indikator kinerja sasaran Persentase wilayah yang memiliki layanan dasar yang baik, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 % $6=5/4*100$
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	Persen		43,09	74,69	173%

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	Persen		74,69	

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	Persen	74,69		

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Infrastruktur Daerah Penunjang Investasi yang dalam Kondisi Mantap adalah indikator yang menunjukkan proporsi infrastruktur strategis daerah—seperti jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan energi, kawasan industri, serta sarana pendukung logistik lainnya—yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal untuk mendukung kegiatan investasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan, kualitas, dan keberlanjutan infrastruktur daerah dalam menunjang kelancaran aktivitas usaha, distribusi barang dan jasa, serta efisiensi biaya produksi.

Indikator ini dipilih karena kualitas infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerah. Persentase infrastruktur penunjang investasi dalam kondisi mantap bersifat relevan dan terukur untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis, sekaligus menjadi dasar penilaian efektivitas kebijakan dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.14.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8 \times 7) - 9}{8 \times 7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	Persen	43,09	74,69	173%	109.090.198.842,56	81.146.726.025,00	57%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(109.090.198.842,56 \times 173\%) - 81.146.726.025,00}{(109.090.198.842,56 \times 173\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 57\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	173%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	51,00%
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	48,11%
			Program Kawasan Permukiman	39,87%
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	54,93%
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	97,63%
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja **indeks pendidikan** di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut

diatas adalah program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Misi 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Tujuan 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Ketahanan Bencana

13. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pengukuran sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 % $6=5/4*100$
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	100,18%	79,86	87,51	109,58%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	79,33	87,51	80,81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	87,51	85,99	Belum rilis

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh pada suatu wilayah dalam periode tertentu. IKLH mencerminkan hasil interaksi berbagai komponen lingkungan yang terdampak oleh aktivitas manusia maupun proses alam, sehingga menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan kebijakan dan program perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan sebagai Tolok ukur capaian kinerja pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, Dasar evaluasi efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan Bahan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung sebagai indeks gabungan dari beberapa indeks kualitas lingkungan Hidup utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL).

IKLH dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKLH = (w_1 \times IKA) + (w_2 \times IKU) + (w_3 \times IKTL)$$

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Keterangan :

w_1, w_2, w_3 = bobot masing-masing indeks (ditetapkan oleh KLHK)

IKA = Indeks Kualitas Air (IKA)

IKU = Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKTL/IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai IKLH berada pada skala **0–100**, dengan interpretasi umum

✧ **> 80** : Baik

✧ **70–80** : Cukup Baik

✧ **< 70** : Kurang

Berdasarkan tabel yang disajikan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Malinau secara menyeluruh. IKLH dinyatakan dalam satuan **poin** dan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Malinau menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan kenaikan capaian kinerja dari 100,18% pada Tahun 2024 menjadi 109,58% pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampaui sasaran yang telah ditetapkan.

Tercapainya nilai IKLH sebesar 87,51 poin menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Malinau pada Tahun 2025 berada pada kondisi baik. Capaian ini mencerminkan bahwa berbagai kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan serta

pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan secara efektif.

Ada Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target yaitu :

- ✓ Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, baik terhadap kualitas air, udara, maupun tutupan lahan;
- ✓ Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha dan/atau kegiatan
- ✓ Peningkatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan;
- ✓ Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tabel III.3.1, realisasi IKLH Tahun 2022–2025, secara umum berada pada kondisi baik dan menunjukkan tren perbaikan pada Tahun 2025. Meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2024, realisasi IKLH Tahun 2025 yang mencapai 87,51 poin menunjukkan keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Pada tingkat Provinsi, realisasi IKLH Tahun 2025 tercatat sebesar 85,99 poin. Jika dibandingkan, capaian IKLH Kabupaten Malinau lebih tinggi sebesar 1,52 poin dibandingkan capaian IKLH Provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau relatif lebih baik dibandingkan rata-rata capaian di tingkat provinsi.



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Capaian IKLH yang melampaui target menunjukkan bahwa strategi pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam mencapai target Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

1. Tekanan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kabupaten Malinau memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang tinggi. Aktivitas pembangunan infrastruktur, pertambangan, perkebunan, dan pembukaan lahan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya pada komponen kualitas air. Tekanan ini menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas nilai IKLH agar tetap berada pada kategori baik secara berkelanjutan.

2. Keterbatasan Cakupan dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan

Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Malinau secara optimal, mengingat kondisi geografis yang luas dan sebagian wilayah sulit diakses. Keterbatasan frekuensi dan titik pemantauan berpotensi memengaruhi kelengkapan data komponen penyusun IKLH, terutama untuk kualitas air dan udara.

3. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Pemantauan

Peralatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, baik untuk pengukuran air, udara, maupun tutupan lahan, sangat terbatas. Ketergantungan pada metode konvensional dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis digital atau spasial menjadi kendala dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan pengumpulan data IKLH.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis

Jumlah dan kapasitas SDM teknis di bidang pemantauan dan analisis lingkungan hidup sangat terbatas, terutama tenaga yang memiliki kompetensi khusus dalam pengolahan data lingkungan dan analisis indeks komposit. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi proses evaluasi dan interpretasi hasil pengukuran IKLH.

5. Kepatuhan Pelaku Usaha yang Belum Optimal

Meskipun terdapat peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup, masih terdapat sebagian usaha atau kegiatan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan, khususnya pada wilayah dengan aktivitas usaha yang intensif.

6. Dinamika Metodologi dan Ketersediaan Data

Perubahan atau penyesuaian metodologi penghitungan IKLH serta keterlambatan ketersediaan data pendukung dari berbagai sumber menjadi tantangan tersendiri. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan evaluasi kinerja agar hasil pengukuran IKLH tetap akurat dan dapat dibandingkan antar periode.

Untuk menghadapi berbagai kendala dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau perlu mengambil langkah strategis dan tindak lanjut yang terintegrasi serta berkelanjutan. Strategi tersebut diarahkan pada penguatan pengendalian dampak pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui integrasi isu lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan daerah serta penegakan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat utama perizinan usaha. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan cakupan dan kualitas pemantauan lingkungan dengan memperluas titik serta frekuensi pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, khususnya pada wilayah yang memiliki tekanan lingkungan tinggi.

Di sisi lain, penguatan sarana, prasarana, dan teknologi pemantauan lingkungan hidup menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data IKLH. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia teknis melalui pelatihan, sertifikasi, dan optimalisasi peran pejabat fungsional lingkungan hidup. Upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha juga harus terus dilakukan melalui pendekatan pembinaan preventif yang disertai penegakan hukum secara proporsional, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan lingkungan.

Selanjutnya, penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dilaksanakan secara sinergis. Evaluasi capaian IKLH secara berkala harus dijadikan dasar dalam penyusunan target dan perbaikan kebijakan di tahun berikutnya. Dengan pelaksanaan strategi dan tindak lanjut tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau diharapkan mampu mempertahankan capaian IKLH yang telah melampaui target serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan di tengah dinamika pembangunan daerah.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.15.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	79,86	87,51	109,58%	12.901.791.639,-	11.145.612.999	21,16	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(12.901.791.639 \times 109,58\%) - 11.145.612.999}{(12.901.791.639 \times 109,58\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 21,16$$

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumber daya, sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target kinerja

sebesar 79,86 poin berhasil direalisasikan menjadi 87,51 poin atau mencapai 109,58%, yang berarti kinerja pengelolaan lingkungan hidup mampu melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Dari sisi penganggaran, pagu anggaran sebesar Rp12.901.791.639,00 direalisasikan sebesar Rp11.145.612.999,00, yang menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran yang tersedia digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian IKLH.

Namun demikian, nilai efisiensi sebesar 21,16% dengan keterangan “Kurang Efisien” menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja telah melampaui target, pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya sebanding dengan hasil yang dicapai. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara besarnya sumber daya keuangan yang dialokasikan dengan kontribusi langsungnya terhadap peningkatan nilai IKLH, yang dapat disebabkan oleh karakteristik IKLH sebagai indikator komposit, keterbatasan keterkaitan langsung antara belanja dan hasil indeks, serta adanya program pendukung yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman program yang berdampak langsung terhadap komponen penyusun IKLH, serta optimalisasi alokasi anggaran agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu. Program-program yang menunjang peningkatan IKLH antara lain kegiatan pemantauan kualitas air dan udara secara berkala, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan tutupan lahan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pelaksanaan program tersebut memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan komponen penyusun IKLH, sehingga realisasi IKLH Tahun Anggaran 2025 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, meningkatnya koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian IKLH secara langsung, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat efisiensi dan kesinambungan kinerja. Keterbatasan cakupan

pemantauan lingkungan, kendala geografis wilayah, serta keterbatasan sarana dan sumber daya manusia teknis menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sebagian kegiatan bersifat jangka panjang sehingga dampaknya terhadap nilai IKLH belum dapat dirasakan secara langsung pada tahun berjalan. Oleh karena itu, diperlukan penajaman perencanaan program dan kegiatan agar lebih fokus pada komponen penyusun IKLH, penguatan sinergi antar perangkat daerah, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan program guna memastikan pencapaian kinerja IKLH yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Tabel 3.15.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	109,58%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	98,59%
			Program Pengelolaan Persampahan	94,96%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 109,58%. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program lingkungan hidup yang secara umum memiliki tingkat penyerapan anggaran tinggi. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup menunjukkan capaian keuangan yang sangat optimal 98,59%, yang mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. Program pengelolaan persampahan menunjukan capaian keuangan sebesar 94,96, yang mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif.

14. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanganan Bencana

Pengukuran sasaran Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana dan indikator kinerja indeks ketahanan daerah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Indeks Ketahanan Daerah	Poin		0,49	0,39	79,59%

Sumber : BPBD Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun		Target Akhir RPJMD 2029
		2024	2025	
1	2	3	4	5
Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,48	0,39	0,54

Sumber : BPBD Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,39	0,57	

Sumber : BPBD Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Ketahanan Daerah adalah indikator komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengantisipasi, dan pulih dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang bersifat alam, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Indeks ini disusun berdasarkan berbagai dimensi seperti ketahanan sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, serta kapasitas kelembagaan dan masyarakat, sehingga mencerminkan tingkat kesiapsiagaan dan daya lenting (resilience) daerah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Indeks Ketahanan Daerah dipilih sebagai indikator kinerja karena ketahanan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang adaptif, aman, dan berkelanjutan.

Kajian kapasitas dianalisis menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM). Pada kajian ini, parameter IKD yang digunakan adalah IKD tahun 2025 yang dihitung berdasarkan 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Dari hasil analisis tersebut, didapatkan nilai IKD Kabupaten Malinau tahun 2025 sebesar 0,39.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian ditumpang-susunkan (*overlay*) dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.

Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan kabupaten/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana.

Sejak tahun 2016 indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4

pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Dalam proses pengumpulan data ketahanan daerah ini, diperlukan diskusi grup terfokus (FGD) yang terdiri dari berbagai pihak di daerah yang dipandu oleh seorang fasilitator untuk memandu peserta menjawab secara obyektif setiap pertanyaan di dalam kuesioner. Setiap pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner harus disertai bukti verifikasi. Bukti verifikasi ini yang menjadi dasar justifikasi diterima atau tidaknya jawaban dari hasil FGD. Setelah masing-masing pertanyaan terjawab, hasil akan diolah dengan menggunakan alat bantu analisis dalam *spreadsheet* atau dalam platform IKD di InaRISK.

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 hingga 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah pada suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dapat dianggap bahwa semua wilayah dalam satu kabupaten/kota memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan. Maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi nilai indeks ketahanan (IKD_T) daerah ke dalam skala yang sama dengan menggunakan persamaan berikut:

Kesiapsiagaan Masyarakat

Penilaian kesiapsiagaan masyarakat diadaptasi dari Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Bencana Gempa Bumi yang disusun oleh LIPI untuk level komunitas dan

mulai diimplementasikan sejak tahun 2013 pada Kajian Risiko Bencana level Kabupaten/Kota di beberapa wilayah Indonesia.

Kesiapsiagaan masyarakat atau Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu komponen kapasitas daerah merupakan penilaian tingkat kesiapsiagaan yang dilakukan melalui metode survei dan wawancara mendalam (*deep interview*) kepada responden aparat pemerintah/ tokoh masyarakat dengan teknik *purposive sampling* pada beberapa desa/kelurahan yang berpotensi terdampak bencana dengan menggunakan kuesioner.

Di dalam kuesioner, kesiapsiagaan masyarakat terdiri dari 2 parameter spesifik dan 3 parameter generik yang dibagi dalam 19 indikator pencapaian. Dari pencapaian 19 indikator tersebut, diperoleh nilai indeks dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat di level desa/kelurahan untuk setiap jenis potensi bencana yang ada pada daerah kabupaten/kota yang dikaji, dengan menggunakan alat bantu yang telah disediakan melalui *spreadsheet*. Parameter tersebut adalah sebagai berikut.

a) Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB)

Pengukuran parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana didasarkan pada indikator pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi bencana, pengetahuan sistem peringatan dini bencana, pengetahuan tentang prediksi kerugian akibat bencana, dan pengetahuan cara penyelamatan diri. Penilaian parameter ini berdasarkan kepada pengetahuan masyarakat terhadap indikator tersebut.

b) Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD)

Pelaksanaan tanggap darurat didasari pada pencapaian tempat dan jalur evakuasi, tempat pengungsian, air dan sanitasi, dan layanan kesehatan. Indikator pencapaian tersebut memiliki tujuan pada masa tanggap darurat melalui ketersediaan-ketersediaan kebutuhan masyarakat.

c) Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM)

Pengaruh kerentanan berdasarkan pada penilaian pengaruh mata pencaharian dan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat dan pemukiman masyarakat.

d) Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP)

Masa pasca bencana dibutuhkan dan diharapkan adanya kemandirian masyarakat terhadap dukungan pemerintah melalui jaminan hidup pasca bencana, penggantian kerugian dan kerusakan, penelitian dan pengembangan, penanganan darurat bencana, dan penyadaran masyarakat.

e) Partisipasi Masyarakat (PM)

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan pemanfaatan relawan desa.

Nilai indeks kesiapsiagaan masyarakat berada pada rentang nilai 0 hingga 1, dengan pembagian kelas tingkat kesiapsiagaan masyarakat:

- Indeks $\leq 0,33$ adalah Rendah
- Indeks $0,34 - 0,666$ adalah Sedang
- Indeks $0,67 - 1$ adalah Tinggi

RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR

$IKD = \sum (\text{Nilai Indeks Prioritas}_i \times \text{Bobot}_i)$, di mana i mewakili 7 prioritas, dan bobot_i disesuaikan berdasarkan petunjuk teknis BNPB

Hasil dari penilaian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat sudah dalam bentuk nilai indeks, namun masih dalam format data tabel. Proses selanjutnya adalah melakukan konversi dari format data tabel menjadi data spasial sehingga dapat digunakan untuk menganalisis indeks risiko bencana. Unit spasial yang digunakan dalam penyusunan peta kapasitas adalah unit administrasi desa/kelurahan untuk setiap jenis bencana yang ada pada wilayah kabupaten/kota yang dikaji.

Bobot Parameter Penyusun Kapasitas Daerah

Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0 – 0,333)	Sedang (0,334 – 0,666)	Tinggi (0,667 – 1,000)
Ketahanan Daerah	40	Transformasi nilai 0 – 0,40	Transformasi nilai 0,41 – 0,80	Transformasi nilai 0,81 – 1
Kesiapsiagaan Masyarakat	60	$<0,33$	$0,34 - 0,66$	$0,67 - 1,00$

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Risiko (*Risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Dalam perhitungan secara matematis dan spasial, risiko bencana dinilai dalam bentuk nilai indeks yang merupakan gabungan nilai dari indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas. Penentuan indeks risiko dilakukan menggunakan konsep persamaan berikut:



$$R = 3H \times V \times 1 - C \text{ atau } R = H \times V \times 1 - C1/3$$

Penyebab Keberhasilan

- a. Integrasi ke dalam perencanaan daerah: Jika IKD menjadi bagian utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akan mendapatkan dukungan anggaran dan prioritas implementasi yang jelas.
- b. Data akurat dan terpadu: Ketersediaan data yang valid dari berbagai sektor (ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan) memastikan perhitungan IKD dapat dilakukan dengan tepat dan menjadi dasar kebijakan yang relevan.
- c. Partisipasi pemangku kepentingan: Keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan swasta dalam pengumpulan data dan analisis hasil IKD membuat rekomendasi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
- d. Pembinaan dan pelatihan: Pemberian pelatihan kepada petugas terkait tentang metode pengukuran dan pemanfaatan IKD meningkatkan kapasitas dalam implementasinya.

Penyebab Kegagalan

- a. Kurangnya dukungan. Jika pemerintah daerah tidak menjadikan IKD sebagai prioritas, akan terjadi kurangnya alokasi anggaran dan kurangnya komitmen dalam pelaksanaannya.
- b. Data tidak konsisten atau tidak tersedia: Banyak daerah masih menghadapi kendala dalam pengumpulan data berkualitas, terutama untuk indikator lingkungan dan sosial yang memerlukan pemantauan berkelanjutan.
- c. Kurangnya pemahaman tentang manfaat IKD: Banyak stakeholder tidak menyadari pentingnya IKD, sehingga tidak ada sinergi dalam upaya peningkatan ketahanan daerah.
- d. Tidak ada mekanisme pemantauan ulang: Hasil IKD tidak diikuti dengan evaluasi berkala, sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan terhadap sektor yang lemah.

Tabel .3.16.3

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	IKD 2025
Bulungan	0,55
Kota Tarakan	0,70
Malinau	0,39
Nunukan	0,59
Tana Tidung	0,60

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.16.4

Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,49	0,39	79,59%	69.445.501.927,00	58.128.314.097,00	-5,16%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : BPBD Tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(69.445.501.927,00 \times 79,59\%) - 58.128.314.097,00}{(69.445.501.927,00 \times 79,59\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = -5,16\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	79,59%	Program Penanggulangan Bencana	92,66%
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	82,81%

Sumber : BPBD Tahun 2025

Misi 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani

Tujuan 5: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Baik, Bersih, Dan Berorientasi Pelayanan

15. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 % $6=5/4*100$
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,52%	84,32	83,66	99,21%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun				Target Akhir RPJMD 2029
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,71	82,75	82,30	83,66	87,45

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.17.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,66	-	-

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kualitas Pelayanan publik mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya publik. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga penelitian untuk menilai tingkat kepuasan serta persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintah dalam berbagai aspek. Melalui IKM, pemerintah memperoleh informasi yang bernilai mengenai kebutuhan, preferensi, dan harapan masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam peningkatan kualitas layanan publik serta penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat dipilih sebagai indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malinau karena kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indikator ini relevan dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan peningkatan kualitas pelayanan, mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pemerintahan daerah yang responsif.

Penyusunan IKM berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai IKM Kabupaten Malinau

diperoleh dari OPD yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pelayanan publik. IKM di Kabupaten Malinau dilaksanakan secara mandiri (OPD melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik di Kabupaten Malinau dan melaksanakan/ membuat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 7 Perangkat Daerah OPP dan 12 UPT Bidang Kesehatan dalam tabel 3.17.3 berikut ini :

Tabel 3.17.3
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD Tahun 2025

No	NAMA OPD	NILAI IKM SETELAH DIKONVERSIKAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88.46	A	Sangat Baik
2	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	87.83	B	Baik
3	Dinas Pendidikan	81.84	B	Baik
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	86.03	B	Baik
5	Dinas Kesehatan PPKB	86,17	B	Baik
6	Kecamatan Malinau Utara	82,28	B	Baik
7	Kecamatan Malinau Barat	80.41	B	Baik
8	RSUD Kabupaten Malinau	80,31	B	Baik
9	UPTD PKM Long Alango	81,19	B	Baik
10	UPTD PKM Metut	83,33	B	Baik



11	UPTD PKM Pulau Sapi	84,58	B	Baik
12	UPTD PKM Long Ampung	79,92	B	Baik
13	UPTD PKM Long Loreh	81,64	B	Baik
14	UPTD PKM Long Nawang	77,40	B	Baik
15	UPTD PKM Long Pujungan	82,53	B	Baik
16	UPTD PKM Malinau Kota	83,74	B	Baik
17	UPTD PKM Malinau Sebrang	88,67	A	Sangat Baik
18	UPTD PKM Tanjung Lapang	93,81	A	Sangat Baik
19	UPTD PKM Sungai Boh	79,24	A	Baik
NILAI IKM KAB. MALINAU		83,66	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.17. realisasi indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 83,66 namun belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 84,32. Walaupun belum mencapai target yang ditentukan namun terdapat adanya peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun terakhir serta target Renstra tahun 2029 yang telah disajikan pada tabel 3.17.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada periode Tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2022, nilai IKM tercatat sebesar 80,71, kemudian meningkat pada Tahun 2023 menjadi 82,75. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan Nilai IKM 82,30 dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan kembali sebesar 83,66 dengan capaian 93,98%. Menarik untuk dicermati bahwa perbandingan pencapaian realisasi IKM Tahun 2025 dengan RPJMD tahun 2029 telah mencaapai sebesar 95,66%.

Secara keseluruhan, capaian IKM menunjukkan konsistensi kinerja pelayanan publik yang semakin baik, ditandai dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan tata kelola pelayanan, penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data tabel 3.17.3 diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik pada OPD yang melaksanakan pelayanan publik di Kabupaten Malinau dipersepsikan baik oleh

masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisaran di antara 77,40–93,81. Dari capaian yang diperoleh di tahun 2025 ini maka, kualitas pelayanan publik Kabupaten Malinau Tahun 2025 masuk dalam predikat “Baik”.

Dalam perjalanan mencapai hasil tersebut terdapat faktor keberhasilan dan hambatan/kendala yang muncul dalam rangka pencapaian target di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Analisis Faktor Keberhasilan

- a) Komitmen tinggi dari pimpinan dalam memprioritaskan kualitas layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pengalokasian sumber daya yang memadai, pembuatan kebijakan yang mendukung, dan implementasi inovasi untuk meningkatkan layanan.
- b) Memastikan layanan publik disediakan dengan standar yang tinggi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pelatihan pegawai, pembaruan proses, dan pengukuran kinerja yang terus-menerus.
- c) melaksanakan Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas dalam menunjang pelayanan public
- d) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik

2. Analisis Faktor Kegagalan

- a) Ketersediaan SDM petugas pelayanan masih kurang.
- b) Masih kurangnya pemahaman petugas pelayanan terhadap standar pelayanan dan SOP yang sudah ditetapkan.

3. Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang ada.
- b) Melaksanakan sosialisasi SOP, briefing pelayanan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan standar pelayanan. Selain itu, dilakukan pemasangan media informasi SOP di area pelayanan serta penguatan budaya kerja melalui pembinaan aparatur, sehingga seluruh petugas memiliki persepsi yang sama dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur.



4. Beberapa upaya yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan capaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2025, diantaranya :

- a) Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- b) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai.
- c) Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan budaya kerja BerAKHLAK.
- d) Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya peningkatan pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik, Pasar Pelayanan Publik

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.17.4
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,32	83,66	99,21%	189.053.255.296,43	170.473.738.792,00	9,10%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(189.053.255.296,43 \times 99,21\%) - 170.473.738.792,00}{(189.053.255.296,43 \times 99,21\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 9,10\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIA K U A N G A N (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,21%	Program Kepegawaian Daerah	92,73%
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	70,13%

			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	44,51%
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95,20%
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	71,19%
			Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	98,32%
			Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	91,44%

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

16. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran nilai SAKIP, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Nilai SAKIP	Nilai	93,52%	72,1	71,17	98,71%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Beberapa Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun				Target Akhir RPJMD 2029
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	Nilai	60,02	62,04	70,12	71,17	80,99

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,17		

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai SAKIP adalah indikator yang menggambarkan tingkat kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Nilai ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola kinerja secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil (outcome), serta menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai SAKIP dipilih sebagai indikator kinerja karena merupakan tolok ukur utama akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas tata kelola pemerintahan, keselarasan perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien

dan bertanggung jawab, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result orientid government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau mencapai nilai sebesar 71,17 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi pengguna anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Dari tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Malinau dengan capaian kinerja 98,71% dimana belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD taahun 20225-2029 yakni terget nilai SAKIP tahun 2025 yang ditetapkan 72,2 namun realisasi tahun 2025 hanya mencapai nilai 71,17.

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai SAKIP pada periode Tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang berkelanjutan. Pada Tahun 2022, nilai SAKIP tercatat sebesar 60,02 atau predikat B, kemudian meningkat pada Tahun 2023 menjadi 62,04 atau predikat B. Tren positif ini terus berlanjut pada Tahun 2024 dengan peningkatan nilai SAKIP 70,12 atau predikat BB, meningkat kembali pada Tahun 2025 sebesar 71,17 atau predikat BB. Adapun tabel hasil evaluasi Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2025 berdasarkan komponen yang dinilai yang kami sajikan dibawah ini sebagai bahan perbandingan kenaikan nilai sakip tahun 2025 dengan tahun 2024.

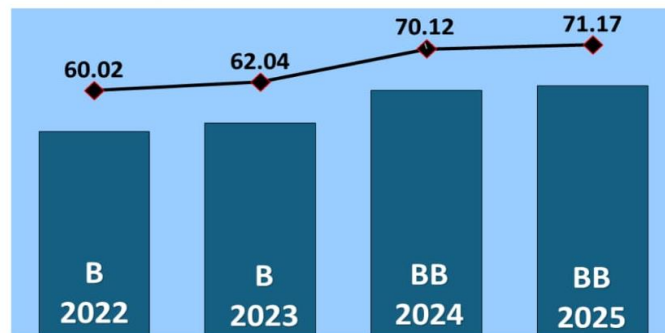
Tabel 3.18.3
Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2025

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2024	NILAI 2025
Perencanaan Kinerja	30%	26,09	26,30
Pengukuran Kinerja	30%	18,48	18,77
Pelaporan Kinerja	15%	11,31	11,58

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	14,24	14,52
Nilai Hasil Evaluasi	100%	70,12	71,17
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber :Kemenpan RB Tahun 2025

Berikut dapat ditampilkan nilai diagram Nilai SAKIP Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir :



Gambar Grafik Nilai SAKIP Kabupaten Malinau

Analisis Penyebab Keberhasilan

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan atau pencapaian nilai SAKIP 2025 yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Telah berupaya melakukan penyusunan pohon kinerja dari level Kabupaten sampai Perangkat Daerah sesuai dengan isu strategi. Pohon kinerja telah diinput di e-SAKIP Kabupaten Malinau dan sudah ada langkah dalam memanfaatkan pohon kinerja untuk diterjemahkan dalam PK tahun 2025.

2. Pengukuran kinerja

Sudah menyusun dokumen IKU periode 2025-2029 level Kabupaten dan PD yang dilengkapi dengan detail deskripsi atau defenisi operasional, sumber data, cara menghitung dan PD penanggung jawab serta telah diunggah pada *esr.menpan.go.id* dan aplikasi SAKP Kabupaten Malinau sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Selain itu, juga OPD telah menyusun rencana aksi PD yang digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi progres kerja dimana pengukuran progres capaian tersebut.

3. Pelaporan Kinerja

Telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2025 tingkat kabupaten dan perangkat Daerah. Laporan tersebut telah diunggah pada *esr.menpan.go.id* dengan tepat waktu.



4. Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal

Telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluruh PD. Sudah dilakukan upaya peningkatan kualitas temuan dan rekomendasi dari evaluasi yang membahas kualitas dari implementasi AKIP di PD yang dievaluasi.

Selain pemenuhan komponen-komponen yg dinilai diatas adapun faktor lain yang juga mempengaruhi peningkatan nilai sakip Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah :

- Telah melaksanakan pendampingan penjaminan mutu/quality Penyusunan Dokumen SAKIP kepada semua OPD secara berkelanjutan.
- Keberadaan aplikasi e Sakip Malinau, mempermudah dalam penyusunan mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kinerja.
- Telah melakukan pendampingan pengisian dokumen SAKIP ke aplikasi SAKIP Kabupaten malinau kepada semua OPD secara berkelanjutan.

Analisis penyebab kegagalan/faktor penghambat keberhasilan

Faktor Penyebab kegagalan / penghambat keberhasilan indikator kinerja utama Nilai Sakip yaitu :

1. Aktivitas dalam rencana aksi maupun dokumen perencanaan pada beberapa perangkat daerah masih didominasi oleh daftar kegiatan rutin. Aktivitas tersebut belum menggambarkan intervensi strategis yang diperlukan untuk mendorong pencapaian sasaran hasil, sehingga kontribusinya terhadap perbaikan kinerja menjadi terbatas;
2. Masih terdapat kurangnya bukti dukung tindak lanjut evaluasi SAKIP internal untuk memastikan relevansi, kesesuaian dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan setiap perangkat daerah.
3. Masih terdapat kendala dalam aplikasi e-sakip.malinau.go.id/v2, yang menyebabkan penginputan tidak sampai pada pengukuran.
4. Masih terdapat kurangnya data analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telaah dikaukan secara khusus untuk indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditentukan.
5. Belum dilakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat secara menyeluruh di tingkat Perangkat Daerah, sehingga hasil pemantauan belum mampu menghasilkan pembelajaran untuk perbaikan dan penyesuaian strategi.
6. Kualitas temuan dan rekomendasi evaluasi internal belum seluruhnya menysar kualitas implementasi SAKIP.



7. Belum terdapat verifikasi atas relevansi dan kesesuaian bukti dukung dengan catatan pada LHE internal, sehingga efektivitas dan ketepatan tindak lanjut tiap PD belum dapat dipastikan.

Upaya Perbaikan / Mengatasi Permasalahan

Tindak lanjut atas perbaikan permasalahan yang tidak tercapai dalam indikator kinerja utama Nilai SAKIP yaitu :

1. Melakukan perbaikan-perbaikan hasil rekomendasi untuk penyempurnaan dokumen-dokumen SAKIP sehingga berkualitas.
2. Memastikan bukti dukung tindak lanjut evaluasi SAKIP internal relevansi, kesesuaian dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan setiap perangkat daerah.
3. Melakukan perbaikan pada aplikasi e-sakip.malinau.go.id/v2, sehingga penginputan dokume SAKIP sampai pada pengukuran.
4. Memastikan penyajian data analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telaah dilkaukan secara khusus untuk indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditentukan.
5. Melakukan pemantauan secara berkala kepada perangkat daerah untuk mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat secara keseluruhan.
6. Melakukan peningkatan kualitas temuan dan rekomendasi agar menyasar kualitas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah yang dievaluasi
7. Melakukan verifikasi terhadap bukti dukung tindak lanjut evaluasi AKIP internal untuk memastikan relevansi, kesesuaian, dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan setiap perangkat daerah.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK : Pagu anggaran keluaran i
- RAK : Realisasi anggaran keluaran i
- CK : Capaian kinerja i

Tabel 3.18.4
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9 \times 100\%}{8x7}$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	72,1	71,17	98,71%				Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Kabupaten Malinau didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara konsisten. Secara umum, program dan kegiatan yang dijalankan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga menunjukkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan. Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain:

Tabel 3.18.5
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIA KINERJA (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	98,71%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	

Pemerintah Daerah			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	92,90%
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	83,45%

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Nilai SAKIP di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

17. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pengukuran sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan indikator kinerja sasaran Opini BPK, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
Opini BPK	Predikat	100%	WTP	WTP	100%

Sumber: BPKD tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun				Target Akhir RPJMD 2029
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP		100%	

Sumber : BPKD tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan diatas Kabupaten malinau ditahun 2025 memperoleh Prdikat dari indikator opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025 mencapai 100%. Pencapaian WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Opini WTP juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun *stakeholder* terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan, (5) Pengungkapan. Kabupaten Malinau senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan.

Keberhasilan Kabupaten Malinau dalam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara konsisten dalam penyusunan LKPD.
- Penguatan sistem pengendalian intern (SPI) melalui pengawasan internal oleh Inspektorat dan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi.
- Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang semakin cepat dan tuntas, sehingga temuan berulang dapat diminimalkan.
- Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terintegrasi, yang meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan keterlacakan data keuangan.

Meskipun kinerja tergolong baik, terdapat beberapa faktor risiko yang berpotensi menghambat atau menurunkan capaian opini WTP di masa mendatang, antara lain:

- Pergantian pejabat pengelola keuangan dan aset yang belum diimbangi dengan transfer pengetahuan yang optimal.

- Masih adanya kelemahan administrasi aset, khususnya dalam pencatatan, penilaian, dan legalitas kepemilikan.
- Keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, terutama dalam rekonsiliasi data keuangan dan aset.
- Perubahan regulasi keuangan yang memerlukan penyesuaian cepat dalam sistem dan prosedur.
- Keterbatasan sarana pendukung dan integrasi sistem, yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, BPKD Kabupaten Malinau telah dan terus melakukan berbagai solusi strategis, antara lain:

- Peningkatan pembinaan dan pendampingan teknis kepada seluruh perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset.
- Penguatan sistem pengendalian intern dan reviu berjenjang, melalui peran aktif Inspektorat dan pengawasan internal.
- Percepatan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, dengan target penyelesaian yang terukur.
- Penyempurnaan SOP pengelolaan keuangan dan aset, agar selaras dengan regulasi terbaru.
- Penguatan integrasi sistem informasi keuangan dan aset, untuk meningkatkan kualitas data dan transparansi.
- Pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan, melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan pembelajaran berbasis praktik.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- *E* : Efisiensi
- *PAK* : Pagu anggaran keluaran *i*
- *RAK* : Realisasi anggaran keluaran *i*
- *CK* : Capaian kinerja *i*

Tabel 3.19.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi $\frac{(8x7)-9}{8x7} \times 100\%$	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100%	Rp. 349.850.372.516,89	Rp. 337.874.160.031,00	0,03%	Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)

Sumber : BPKD tahun 2025

$$\text{Efisiensi} = \frac{(349.850.372.516,89 \times 100\%) - 337.874.160.031,00}{(349.850.372.516,89 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 0,03\%$$

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	96,57%
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	96,82%

Sumber : BPKD Tahun 2025

Dari tabel diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja opini BPK di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah. Kabupaten Malinau dalam melaksanakan program pada tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp 2.728.885.798.763,15 dengan capaian sebesar 99,18%.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran yang mencapai 90% menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau telah mengelola anggarannya dengan efektif. Realisasi yang efektif di semua Program mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, serta penggunaan anggaran telah dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Lebih lengkapnya, realisasi anggaran tiap program terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Tiap Program Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Sisa Anggaran	Sisa (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Program pengelolaan pendidikan	Rp. 159.908.397.203,08	Rp 139.978.423.889,00	87,54%	Rp 19.929.973.314,08	12,46%
		Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Rp. 138.920.482.939,23	Rp 132.254.589.747,00	95,20%	Rp 6.665.893.192,23	4,79%



		Pembinaan Perpustakaan	Rp. 822.990.000,00	Rp 725.394.720	88,14%	Rp 97.595.280,00	11,85%
		Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 4.263.840.741,10	Rp 3.635.233.510,00	85,26%	Rp 628.607.231,10	14,74%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 56.375.981.638	Rp 46.033.661.563	82%	Rp 10.342.320.075	18%
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp. 2.032.009.000,00	Rp 617.924.795	30,40%	1.414.084.205,00	69,6%
		Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp. 518.842.000	Rp 413.574.031	79,71%	105.267.969	20,29%
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 99.343.900,00	99,34%	Rp 656.100	0,66%
		Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.322.087.000,00	Rp. 1.318.852.400,00	99,76%	Rp 3.234.600,00	0,24%
		Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 184.460.910,00	Rp. 163.826.250,00	88,81%	Rp 20.634.660,00	11,19%
		Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 410.558.558,00	Rp. 408.992.571,00	99,62%	Rp 1.565.987,00	0,38%
		Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Rp. 138.920.482.939,23	Rp 132.254.589.747,00	95,20%	Rp 6.665.893.192,23	4,79%
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berakarakter dan beretika	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 4.214.277.600,00	Rp 4.153.008.377,00	98,55%	Rp 61.269.223,00	1,45%
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 5.561.650.309,20	Rp. 5.553.325.348,00	99,85%	Rp 8.324.961,20	0,14%
		Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 4.214.277.600,00	Rp 4.153.008.377,00	98,55%	Rp 61.269.223,00	1,45%
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 787.400.000,00	Rp 604.431.040,00	76,76%	Rp 182.968.960,00	23,23%
		Program Rehabilitasi Sosial	Rp 527.066.800,00	Rp. 520.458.920	98,75 %	Rp 6.607.880,00	1,25%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	Rp 40.517.614.470,00	Rp 19.491.114.991,00	48,11	Rp 21.026.499.479,00	51,89%
		Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 2.284.825.000,00	Rp 1.255.056.650,00	54,93	Rp 1.029.768.350,00	45,07%
		Program pengembangan Kapasitas daya saing olahraga	Rp 63.927.443.312,00	Rp 53.337.271.577,00	83,43%	Rp 10.590.171.735,00	16,56%
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.294.725.000,00	Rp 1.249.894.000,00	96,53%	Rp 44.831.000,00	3,46%
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 4.726.166.400,00	Rp 3.585.385.893,00	75,86%	Rp 1.140.780.507,00	24,14%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 639.487.400,00	Rp 436.559.258,00	68,26%	Rp 202.928.142,00	31,74%
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMMKM)	Rp 350.554.600,00	Rp 317.970.419,00	90,70%	Rp 32.584.181,00	9,3%



6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 38.636.012.124,00	Rp 37.721.488.945,40	97,63%	Rp 914.523.178,60	2,36%
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 589.772.905,00	Rp 519.941.610	88,15%	Rp 69.831.295,00	11,83%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 119.288.500	Rp 118.285.226	99,16%	Rp 1.003.274	0,84%
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMMKM)	Rp 350.554.600,00	Rp 317.970.419,00	90,70%	Rp 32.584.181,00	9,3%
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 6.297.579.252,99	Rp 6.141.489.689,00	97,52%	156.089.563,99	2,48%
		Program Pemasaran Pariwisata	Rp 1.623.742.525,00	Rp 1.567.078.407,00	96,51%	56.664.118,00	3,49%
		Program Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.925.280.279,96	Rp 1.914.349.715,00	99,43%	10.930.564,96	0,57%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.691.186.225,00	Rp 1.596.515.860,00	94,40%	Rp 94.670.365,00	5,60%
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.119.184.150,00	Rp 2.739.267.841,00	87,82%	Rp 379.916.309,00	12,17%
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 46.999.100,00	Rp 37.118.430	78,97%	Rp 9.880.670,00	21,02%
9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.146.024.900,00	Rp 144.852.982	99,19%	Rp 1.171.918,00	0,80%
		Program Hubungan Industrial	Rp 522.816.400,00	Rp 505.781.078,00	96,74%	Rp 17.035.322,00	3,25%
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 10.779.047.910	Rp 9.205.922.836	85,40%	Rp 1.573.125.074	14,6%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 13.427.067.850,00	Rp 12.569.984.617,00	93,61%	Rp 857.083.233,00	6,39%
		Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rp 2.643.378.900,00	Rp 2.094.977.048,00	79,25%	Rp 548.401.852,00	20,74
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 83.222.000,00	Rp 81.146.970,00	97,50%	Rp 2.075.030,00	2,5%
11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 277.102.928.030,71	Rp 254.443.402.403,00	91,82%	Rp 22.659.525.627,71	8,17%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 80.903.725.720,00	Rp 77.037.627.005,00	95,22%	Rp 3.866.097.715,00	4,77%
12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 6.477.239.952,00	Rp 3.303.558.995,00	51,00%	Rp 3.173.680.957,00	49%%



		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 40.517.614.470,00	Rp 19.491.114.991,00	48,11%	Rp 21.026.499.479,00	51,89%
		Program Kawasan Permukiman	Rp 2.240.000.000,00	Rp 893.195.000,00	39,87%	Rp 1.346.805.000,00	60,13%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 2.284.825.000,00	Rp 1.255.056.650,00	54,93%	Rp 1.029.768.350,00	45,06%
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 57.570.519.420,56	Rp 56.203.800.389,00	97,63%	Rp 1.366.719.031,56	2,37%
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 3.712.477.400,00	Rp. 3.660.245.282,00	98,59%	Rp. 52.232.118,00	1,41%
		Program Pengelolaan Persampahan	Rp 2.745.311.779,00	Rp. 2.606.881.890,00	94,96%	Rp 138.429.889,00	5,04%
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 6.253.248.594,00	Rp 5.794.301.375,00	92,66%	Rp 458.947.219,00	7,34%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 63.192.253.333,00	Rp 52.334.012.722,00	82,81%	Rp 10.858.240.611,00	17,18%
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Kepegawaian Daerah	Rp 26.665.387.386,20	Rp 24.728.144.815,00	92,73%	Rp 1.937.242.571,20	7,27%
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 4.731.746.500,00	Rp 3.318.516.995,00	70,13%	Rp 1.413.229.505,00	29,87%
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 13.289.222.540,0	Rp 5.914.853.854	44,51%	Rp 7.374.368.686	55,49%
		Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Rp. 138.920.482.939,23	Rp 132.254.589.747,00	95,20%	Rp 6.665.893.192,23	4,79%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 3.889.644.756,00	Rp 2.769.278.271,00	71,19%	Rp 1.120.366.485,00	28,80%
		Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp 941.438.275	Rp 925.636.095	98,32%	Rp 15.802.180	1,68%
		Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp 615.332.900,00	Rp 562.719.015,00	91,44%	Rp 52.613.885,00	8,5%
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Rp 1.088.427.661.311,85				
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 523.095.700	485.966.188	92,90%	37.129.512	7,1%
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 3.112.888.400,00	Rp. 2.597.722.639	83,45%	Rp 515.165.761,00	16,55%
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 347.150.052.276,89	Rp 335.259.458.491,00	96,57%	Rp 11.890.593.785,89	3,41%



aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.700.320.240,00	Rp 2.614.701.540,00	96,82%	Rp 85.618.700,00	3,18%
JUMLAH		Rp 2.728.885.798.763, 15	Rp 2.706.720.509.31 0,25	99,18%	Rp 22.165.289.45 2,90	0,81%

D. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran, selain capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan yang telah disajikan di atas diperlukan juga analisis efektivitas dan efisiensi sebagai gambaran apakah penggunaan anggaran tersebut sudah tepat sesuai dengan apa yang direncanakan dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

EFEKTIVITAS

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tujuan atau hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan cara yang paling optimal. Dalam berbagai bidang, seperti manajemen, pendidikan, dan kebijakan publik, efektivitas menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan suatu strategi atau program. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi perencanaan yang matang, penggunaan sumber daya yang efisien, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian target. Tanpa efektivitas, upaya yang dilakukan bisa menjadi sia-sia karena tidak menghasilkan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan efektivitas melalui inovasi, pengukuran kinerja, serta penyesuaian strategi berdasarkan data dan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/ 2017, efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas anggaran} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja total}}{\text{Pagu anggaran belanja total}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, kriteria penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- Sangat Efektif : Efektivitas > 100%
- Efektif : 90% ≤ Efektivitas ≤ 100%
- Cukup Efektif : 80% ≤ Efektivitas < 90%
- Kurang Efektif : 60% ≤ Efektivitas < 80%



- Tidak Efektif : $0\% \leq \text{Efektivitas} < 60\%$

Tabel 3.21
Tingkat Efektivitas Anggaran Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	98,06%	303.915.710.883,41	276.593.641.866,00	91,00%	Efektif
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	100,01%	58.926.832.638,00	47.065.160.389	79,87%	Kurang Efektif
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	98,30%	2.017.106.468,00	1.991.015.121,00	98,70%	Efektif
		Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	100%	138.920.482.939,23	132.254.589.747,00	95,20%	Efektif
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan		13.990.205.509,20	13.859.342.102,00	99,06%	Efektif
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	79,01%	44.116.906.270,00	Rp 21.871.061.601,00	49,5%	Tidak Efektif
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	116,26%	1.294.725.000,00	1.249.894.000,00	96,53%	Efektif
		Tingkat Pengangguran Terbuka	111, 40%	5.365.653.800,00	4.021.945.151,00	74,94%	Kurang Efektif
		Indeks Gini	109,4%	350.554.600,00	317.970.419,00	90,70%	Efektif
6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	95,90%	39.225.785.029,00	38.359.715.781,40	97,49%	Efektif
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	98,10%	350.554.600,00	317.970.419,00	90,70%	Efektif
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	107,28%	9.846.602.057,95	9.622.917.811,00	97,72%	Efektif
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		1.691.186.225,00	1.596.515.860,00	94,40%	Efektif
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian		3.119.184.150,00	2.739.267.841,00	87,82%	Cukup Efektif
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	-984%	46.999.100,00	37.118.430	78,97%	Kurang Efektif

9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	280%	668.841.300,00	650.634.060,00	97,27%	Efektif
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	121,16%	26.849.494.660,00	23.870.884.501,00	88,90%	Cukup Efektif
		Laju inflasi daerah	89,2%	83.222.000,00	81.146.970,00	97,50%	Efektif
11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	69,4%	358.006.653.750,71	331.481.029.408,00	92,59%	Efektif
12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar yang baik	173%	109.090.198.842,56	81.146.726.025,00	74,38%	Kurang Efektif
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	109,58%	6.457.789.179,00	6.267.127.172,00	97,04%	Efektif
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	79,59%	69.363.722.527,00	58.128.314.097,00	83,70%	Cukup Efektif
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,21%	189.053.255.296,43	170.473.738.792,00	90,17%	Efektif
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	98,71%	1.092.060.145.411,85			
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	100%	349.850.372.516,89	337.874.160.031,00	96,57%	Efektif

Efisiensi

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{(PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK_i : Pagu anggaran keluaran i



- *RAKi* : Realisasi anggaran keluaran *i*
- *CKi* : Capaian kinerja *i*

Tabel 3.22
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Iku)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi $\frac{(8 \times 7) - 9}{100} \times 8 \times 7$	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	71,24	69,86	98,06%	303.915.710.883,41	276.593.641.866,00	7,19%	Efisien
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	82,01	82,05	100,01%	58.926.832.638,00	47.065.160.389,00	20,13%	Tidak efisien
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	0,472	0,48	101,7%	2.017.106.468	1.991.015.121	0,41%	Efisien
		Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	100	100	100%	138.920.482.939,23	132.254.589.747,00	4,7%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,79			13.990.205.509,20	13.859.342.102,00		
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	68,22	53,90	79,01%	44.116.906.270,00	21.871.061.601,00	37,25%	Tidak efisien
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,64	5,56	116,26%	1.294.725.000,00	1.249.894.000,00	16,96%	Efisien
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,07	3,42	111,40%	5.365.653.800,00	4.021.945.151,00	32,71%	Tidak efisien
		Indeks Gini	0,275	0,249	109,4%	350.554.600,00	317.970.419,00	17,08%	Efisien
6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9,77	9,37	95,90%	39.345.073.529,00	38.359.715.781,40	-1,6	Efisien
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,11	2,07	98,10%	350.554.600,00	317.970.419,00	7,53%	Efisien
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,06	2,21	107,28%	9.846.602.057,95	9.622.917.811,00	8,90%	Efisien
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,98			1.691.186.225,00	1.596.515.860,00		
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor pertanian	5,94			3.119.184.150,00	2.739.267.841,00		
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	54,87	-5,4	-9,84%	46.999.100,00	37.118.430	90	Tidak Efisien



9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	26,67	74,69	180%	668.841.300,00	650.634.060,00	0,65%	Efisien
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	4,30	5,21	121,16%	26.849.494.660,00	23.870.884.501,00	26,6%%	Tidak Efisien
		Laju inflasi daerah	2,5	2,230	89,2%	83.222.000,00	81.146.970,00	-9,31%	Efisien
11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	0,50	0,347	69,4%	358.006.653.750,71	331.481.029.408,00	-33%	Tidak Efisien
12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	43,09	74,69	173%	109.090.198.842,56	81.146.726.025,00	57%	Tidak efisien
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,86	87,51	109,58%	6.457.789.179,00	6.267.127.172,00	21%	Efisien
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,39	79,59%	69.445.501.927,00	58.128.314.097,00	-5,16%	Efisien
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,32	83,66	99,21%	189.053.255.296,43	170.473.738.792,00	9,10%	Efisien
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,1	71,17	98,71%	1.092.060.145.411,85			
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%	349.850.372.516,89	337.874.160.031,00	3,42%	Efisien

Catatan : Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)



E. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT SAKIP TAHUN 2025
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRESS PENYELESAIAN	LINK DATA DUKUNG
	Catatan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029				
1	Outcome (Sasaran Program) pada Tabel III.6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, telah disajikan secara lengkap, detil, dan terukur. Namun Pemkab Malinau perlu menyesuaikan Outcome Program Prioritas dengan Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD, agar outcome dan indikator program prioritas yang ditetapkan menggambarkan strategi "prioritas" untuk mencapai tujuan dan sasaran	1. Pada dasarnya, penentuan program prioritas di RPJMD sdh berdasarkan outcome dan juga strategi, bisa dilihat pada tabel kertas kerja di file kertas kerja (sheet pertama) 2. Konsep penyajian di inmendagri 2/2025 tidak ada kaitan langsung antara outcome dengan strategi lampirkan konsep RPJMD dalam inmendagri. 3.outcome dan strategi tidak saling bersinggungan tapi sama sama mempengaruhi penentuan program prioritas.	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-MU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
2	Terdapat indikator dalam Outcome program prioritas yang perlu diperbaiki	Indikator dalam Outcome program prioritas sudah diperbaiki dan sudah tertuang di dalam Dokumen RPJMD	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-MU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
	Catatan Perjanjian Kinerja Bupati 2025				
3	Sebagian besar target pada tahun 2025 sudah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, namun masih terdapat beberapa indikator yang target tahun 2025 nya lebih rendah dibandingkan realisasi 2024, misal Pengeluaran Per Kapita, Indeks Kualitas Udara	1. Pada RKPD Perubahan tahun 2025 untuk target Pengeluaran Per Kapita disesuaikan dengan hasil realisasi tahun 2024 dan dapat dilihat pada data dukung. 2. untuk indikator Indeks Kualitas Udara ada perubahan target berdasarkan SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029.	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
	Catatan Pohon Kinerja				
4	Belum upload pohon kinerja level pemda dalam esakiprevi	Sudah di upload pohon kinerja level pemda dalam esakiprevi dari Misi 1 sampai Misi 6	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
	Catatan IKU Daerah				
5	Dokumen manual IKU belum diupload dalam esakiprevi	Dokumen manual IKU sudah diupload dalam esakiprevi	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
	Catatan LPPD				
6	Untuk data capaian kinerja yang capaian dan persentase capaian masih kosong dalam LKIP Kabupaten mohon bisa dilengkapi, misal Indeks Pembangunan Kebudayaan dan nilai LPPD. Rasio rumah layak huni untuk persentase capaian juga masih kosong datanya dalam tabel	Data realisasi dan persentase capaian kinerja beberapa indikator kinerja dalam LKIP Kabupaten sudah dilengkapi	Kabag. Organisasi	Telah selesai	https://bit.ly/MTLSAKIP2025TW2
7	Tabel analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya bisa dirangkum menjadi 1 tabel pada bagian akhir Bab Akuntabilitas Kinerja. Agar terlihat perbandingannya dari seluruh sasaran kinerja	Tabel analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya sudah dibuat dan dirangkum menjadi 1 tabel pada bagian akhir Bab Akuntabilitas Kinerja	Kabag. Organisasi	Telah selesai	https://bit.ly/MTLSAKIP2025TW2
	Catatan umum Unit Kerja				
8	Masih terdapat kondisi kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi dan atau kinerja utama	Kondisi kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan (Renstra) sudah menjawab isu strategis yang dihadapi unit kerja sesuai dengan pohon kinerja yang disusun	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
9	Perlu penajaman kondisi kinerja dan memastikan keselarasan dalam mewujudkan kinerja tiap jenjang, guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan telah berorientasi outcome dan sesuai dengan jenjang levelnya	Telah dilakukan penajaman kondisi kinerja dan keselarasan dalam mewujudkan kinerja tiap jenjang telah berorientasi outcome dan sesuai dengan jenjang levelnya yang terintegrasi dengan pohon kinerja yang telah disusun	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
10	Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis belum seluruhnya diikuti dengan indikator kinerja yang Spesifik, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound (SMART) dan cukup, khususnya Relevan	Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis sudah memenuhi indikator kinerja yang Spesifik, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound (SMART) dan cukup, khususnya Relevan telah dituangkan pada tabel tujuan, sasaran OPD (Indikator dan target)	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
11	Dalam pengukuran data kinerja yang terlihat pada manual IKU, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Data kinerja yang digunakan untuk pengukuran kinerja dituangkan dalam tabel Manual IKU, sudah dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan perbaikan tabel Manual IKU OPD (Indikator, rumusan, definisi operasional, sumber data, penanggungjawab)	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7
12	Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan dengan baik terutama pada proses penentuan target kinerja tahun berikutnya dituangkan pada tabel target IKU, IKK, program, kegiatan dan sub kegiatan	Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja sudah dimanfaatkan dengan baik untuk proses penentuan target kinerja tahun berikutnya dituangkan pada tabel target IKU, IKK, program, kegiatan dan sub kegiatan	Kepala Bappeda	Telah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XGMU-Byr8WhxBK3Lisj8JEKRKw1pjE7

Malinau, 1 November 2025
SEKRETARIS DAERAH

Dr. ERNES SILVANDUS, S.Pi., M.M., MH.
NIP. 19740914 199803 1 002



BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau selama tahun 2025 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Malinau akan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang telah diraih oleh Kabupaten Malinau selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang terjadi dijadikan pelajaran berharga untuk melangkah menuju Malinau yang lebih baik di hari esok.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2025, dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun mendatang akan tetap difokuskan pada :

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Government*).
- Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik.
- Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi kinerja pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
- Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang



dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergis, inovatif dan kolaboratif bersama masyarakat dan semua pihak.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi



LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Perjanjian Kinerja dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan yang terkait dengan rencana strategis daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029.

Demikian akhirnya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malinau, 19 September 2025


BUPATI MALINAU

WEMPI W. MAWA, SE., M.H



BUPATI MALINAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WEMPI W. MAWA, SE., M.H

Jabatan : BUPATI MALINAU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malinau, 19 September 2025


BUPATI MALINAU

WEMPI W. MAWA, SE., M.H



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	71.24
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	82.01
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	0,472
		Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	100
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,79
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	68,22
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,64
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,07
		Indeks Gini	0,275
6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9,77
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,11
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,06
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,98
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan nilai produksi pengolahan sector pertanian	5,94
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	54,87
9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang Investasi yang dalam kondisi mantap	26,67
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	4,3
		Laju Inflasi daerah	2,5 ± 1
11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	0,5
12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	43,04
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,86
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,32
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,1
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP



NO	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 155.234.672.963,01
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 137.081.017.819,23
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 822.990.000,00
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 4.263.840.741,10
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2.032.009.000,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 1.028.421.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 22.276.000,00
3	Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 100.000.000,00
		Program Perlindungan Perempuan	Rp 1.322.087.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 184.460.910,00
		Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 410.558.558,00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 137.081.017.819,00
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 787.400.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	Rp 527.066.800,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	Rp 40.517.614.470,00
		Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 2.284.825.000,00
		Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 4.214.277.600,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 5.561.650.309,20
		Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 4.214.277.600,00
-	-	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahrgaan	Rp 2.643.378.900,00
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 350.554.600,00
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 4.726.166.400,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 639.487.400,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.294.725.000,00
6	Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 38.636.012.124,00
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 589.772.905,00
		Program Penanaman Kerawanan	



NO	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 350.554.600,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 6.297.579.252,99
		Program Pemasaran Pariwisata	Rp 1.623.742.525,00
		Program Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.925.280.279,96
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.691.186.225,00
7	Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas		
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.119.184.150,00
8	Meningkatnya Realisasi nilai investasi		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 46.999.100,00
9	Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 146.024.900,00
		Program Hubungan Industrial	Rp 522.816.400,00
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 523.854.150,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 10.779.047.910,00
		Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rp 10.779.047.910,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 1.086.183.644,00
11	Meningkatnya kapasitas dan Kualitas Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 275.881.406.630,71
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 80.903.725.720,00
12	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 3.645.239.952,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 40.517.614.470,00
		Program Kawasan Permukiman	Rp 2.240.000.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 2.284.825.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 54.225.138.220,56
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 13.289.222.540,00
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 3.712.477.400,00
		Program Pengelolaan Persampahan	Rp 2.745.311.779,00
14	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana		
		Program Penanggulangan Bencana	Rp 6.253.248.594,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 63.110.473.933,00
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
		Program Kepegawaian Daerah	Rp 13.550.540.526,00



NO	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 4.731.746.500,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 13.289.222.540,00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 137.081.017.819,23
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 3.889.644.756,00
		Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp 481.708.025,00
		Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp 615.332.900,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.088.427.661.311,85
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 519.595.700,00
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 3.112.888.400,00
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 399.200.536.816,67
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.814.320.240,00

Malinau, 19 September 2025



BUPATI MALINAU

WEMPI W. MAWA, SE., M.H

